



# **LAPORAN KINERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2022**





# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LINGKUP BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk TA. 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPPSDMP Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 1 Maret 2023

Inspektur II

Suprodjo Wibowo, SE, M.Si  
NIP. 197012291991031003



## **KATA PENGANTAR**



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2021.



Jakarta, 5 Februari 2023  
Kepala Badan PPSDMP

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr  
NIP. 1964062311989031002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja atau Lakin Badan PPSDMP tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020- 2024 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Lakin Badan PPSDMP tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2022.

Mengacu pada peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lakin ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2022. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2020-2024, Visi Badan PPSDMP adalah : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah: Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan Memantapkan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Persentase petani yang menerapkan teknologi; 2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; 3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian bekerja di bidang pertanian; 5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP; 6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Untuk mencapai



target indikator yang telah ditetapkan, maka Badan PPSDMP menetapkan tujuan yaitu : a). Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan : Petani yang menerapkan teknologi pertanian dan Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; b). Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian; c). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; d). Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP; e). Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah: Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian, Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Strategi yang dilaksanakan Badan PPSDMP adalah Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional meliputi : Pengembangan pelatihan vokasi, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi; Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi; Komando Strategis Pembangunan Pertanian; Pengarustamaan Gender; Program Utama Kementerian Pertanian;



Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Badan PPSDMP adalah: 1). Penguatan implementasi manajemen ASN; 2). Penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3). Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4). Transformasi pelayanan publik.

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi : Pelatihan teknis mendukung program prioritas, Sertifikasi Profesi bidang Pertanian, Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP, Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani, Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri (IPDMIP, READSI, SIMURP, YESS), Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian dan Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP tahun 2022 menetapkan sasaran program yaitu Termanfaatkannya teknologi pertanian, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima, dan Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas. Persentase capaian dari masing-masing indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2022 telah terealisasi sebagai berikut :

Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1). Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian **101,04%**; 2). Persentase SDM pertanian yang meningkat **113,60%**; 3). Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu **105,57%**; 4). Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya **101,23 %**;



5). Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP **103,55%**; 6). Nilai kinerja anggaran BPPSDMP **100,25 %**;

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Rp **1.255.884.425.497,-** dari pagu sebesar Rp **1.270.982.321.000,-** Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2022 adalah **98,81%**.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 392.916.885.272,-; Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 88.211.581.469,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 492.600.414.117,- ; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 282.155.544.639,-.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	6
D. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelatihan.....	10
E. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pendidikan.....	15
F. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2022..	20
G. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2022.....	22
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>24</b>
A. Rencana Strategis.....	24
B. Perjanjian Kinerja tahun 2022.....	39
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>40</b>
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	40
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Th 2022.....	40
1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2022.....	41
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 3 (tiga) tahun 2020–2022.....	58
3 Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) .....	60
4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	61
5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya..	82
C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2022	83
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Langkah Dimasa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerja.....	93
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>



## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2022.....	22
Tabel 2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP.....	27
Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi.....	36
Tabel 4. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024.....	37
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022.....	39
Tabel 6. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2022.....	41
Tabel 7. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Bulan Maret 2022.....	46
Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian.....	48
Tabel 9. Rekapitulasi data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan tanggal 31 Desember 2022.....	53
Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan BPPSDMP tahun 2022....	55
Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform BPPSDMP tahun 2022.....	56
Tabel 12. Persentase Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja di bidang Pertanian Tahun 2020-2022.....	59
Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024).....	61
Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2022 .....	84
Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2022 .....	85
Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2022 .....	86
Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2022.....	87
Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2022.....	87



## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2022 .....	21
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	21
Gambar 3. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2022.....	23
Gambar 4. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).....	51
Gambar 5. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022.....	58
Gambar 6. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2022 .....	85



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Kondisi pandemi Covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan tren menurun tingkat inflasi tetap dijaga dengan target sebesar 2,7% pada tahun 2024 melalui program pertanian yang berbasis skala ekonomi dan menggunakan inovasi teknologi pertanian, sehingga biaya produksi dapat menjadi lebih murah dan harga pokok produksi komoditas pertanian nasional menjadi lebih kompetitif.



Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020- 2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2 Presiden, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu kunci mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian diberi mandat untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, BPPSDMP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

BPPSDMP memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BPPSDMP, serta peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi oleh BPPSDMP. Adapun peluang dan permasalahan tersebut adalah: 1. **Kekuatan** (*Strength*) yaitu a). Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; b). Tersedia tenaga Penyuluh, Widyaiswara, Dosen dan Guru; dan c). Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta Pendidikan pertanian. 2. **Kelemahan** (*Weakness*) yaitu a). Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah; b). Tingkat pendidikan petani masih rendah; c). Kapasitas kelembagaan petani masih rendah; d). Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan; e). Jumlah SDM pertanian yang kompeten masih rendah; f). Link and match antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja belum optimal; g). Distribusi dan pemasaran produk pertanian. 3. **Peluang** (*Opportunity*) yaitu a).



Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis; b). Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi; c). Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi; d). Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian; e). Bonus Demografi; f). Industri 4.0, 4. **Tantangan** (*Threat*) yaitu a). Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal; b). Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi; c). Kondisi perekonomian global; d). Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam; e). Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Era Tatanan Baru; f). Mempersiapkan SDM di Era VUCA.

Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Program aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 ini mendukung program utama Kementerian Pertanian, yaitu (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen. Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia haruslah menjadi fokus utama dari ketiga pilar BPPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga BPPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara umum harus mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.



Dalam perjalanannya melaksanakan tugas pengembangan SDM Pertanian, BPPSDMP menghadapi isu strategis, antara lain: 1) Rendahnya penerapan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian oleh petani di lapangan; 2) rendahnya kapasitas SDM pertanian; 3) rendahnya kompetensi SDM pertanian di bidang pertanian; 4) rendahnya minat generasi muda terhadap sector pertanian; 5) rendahnya kelembagaan petani; 6) belum *link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja; 7) dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang untuk menjadi pemerintah kelas dunia belum optimal.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BPPSDMP didukung oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai dan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya.

BPPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Program pada fungsi ekonomi yaitu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi, Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP, sedangkan program fungsi pendidikan adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.

Mengacu pada strategi Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.

BPPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat BPPSDMP. Selain itu, BPPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjinereng Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan



Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPPSDMP. Kinerja BPPSDMP tidak terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatan dari *stakeholder* BPPSDMP, yang antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BPPSDMP.

Tugas BPPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh BPPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan



pertanian;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **C. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMP**

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II Pusat dan 20 UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat BPPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
12. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tangerang Banten;
13. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;



16. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
21. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Kementerian Pertanian dari masing-masing pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

### **1. Pusat Penyuluhan Pertanian**

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan



pertanian;

- d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

## **2. Pusat Pelatihan Pertanian**

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan
- f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

## **3. Pusat Pendidikan Pertanian**

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan



- pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
  - c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
  - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; *dan*
  - f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

#### **4. Sekretariat BPPSDMP**

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.



#### **D. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pelatihan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pelatihan di BPPSDMP, didukung oleh:

##### **1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;



- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.
- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP;



## **2. Balai Besar Pelatihan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas dan melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidangnya;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi bidangnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;



- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknis pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, dan instalasi;

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Balai Besar Pelatihan, didukung oleh 6 (enam) unit kerja Balai Besar Pelatihan yaitu :

- a. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
- b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
- c. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
- d. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
- e. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
- f. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
- g. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur.

### **3. Balai Pelatihan Pertanian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas dan



melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidangnya;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi bidangnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;



- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- q. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, dan instalasi;

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Balai Pelatihan Pertanian, didukung oleh 2 (dua) unit kerja Balai Pelatihan Pertanian yaitu :

- a. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; dan
- b. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung.

## **E. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan di BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan di BPPSDMP, didukung oleh:

### **1. Politeknik Pembangunan Pertanian**

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian



- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.
- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BPPSDMP, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian.

Transformasi ini merupakan tindaklanjut dari Undang - undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI No.25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan tanggal 28 Mei 2018. Kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mencabut Permentan Nomor 36/Permentan/SM.220/ 8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian sebagai berikut: 1) Permentan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor; 2) Permentan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa; 3) Permentan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Malang; 4) Permentan Nomor 32 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;



5) Permentan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan; dan 6) Permentan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan, didukung oleh 6 (enam) unit kerja Politeknik Pembangunan Pertanian yaitu:

- a. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
- b. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
- c. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
- e. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
- f. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat.

## **2. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)**

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis BPPSDMP maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian.

Berdasarkan Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019. Dalam menjalankan tugasnya PEPI Serpong berpedoman pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya PEPI Serpong adalah :



- a. Menghasilkan tenaga terampil bidang pertanian dan wirausahawan muda yang profesional, kompeten, berdaya saing dan berkarakter untuk mewujudkan regenerasi petani.
- b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan kompetensi di bidang pertanian.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan pembelajaran dengan *system teaching factory*.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
- f. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang pertanian dan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- g. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pelatihan bidang pertanian dan agrowisata untuk meningkatkan minat terhadap dunia pertanian.
- h. Melakukan kemitraan dengan kelompok tani dan DU/DI.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, maka Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.



- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### **3. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PPN)**

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja SMK-PPN, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;



- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan, didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) yaitu :

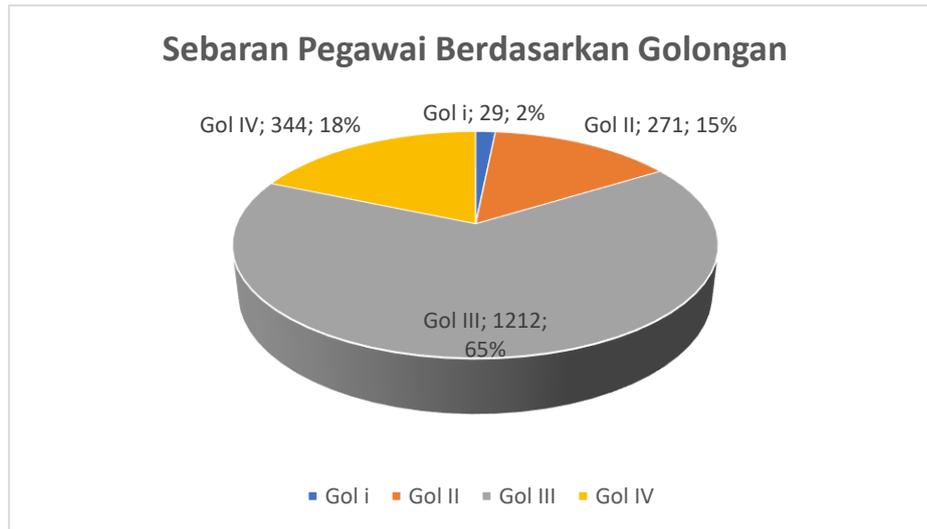
1. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

#### **F. Sumber Daya Manusia BPPSDMP Tahun 2022**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2022 BPPSDMP didukung oleh 1.856 orang aparat yang terdiri atas 1.098 orang aparat laki-laki dan 758 aparat perempuan.

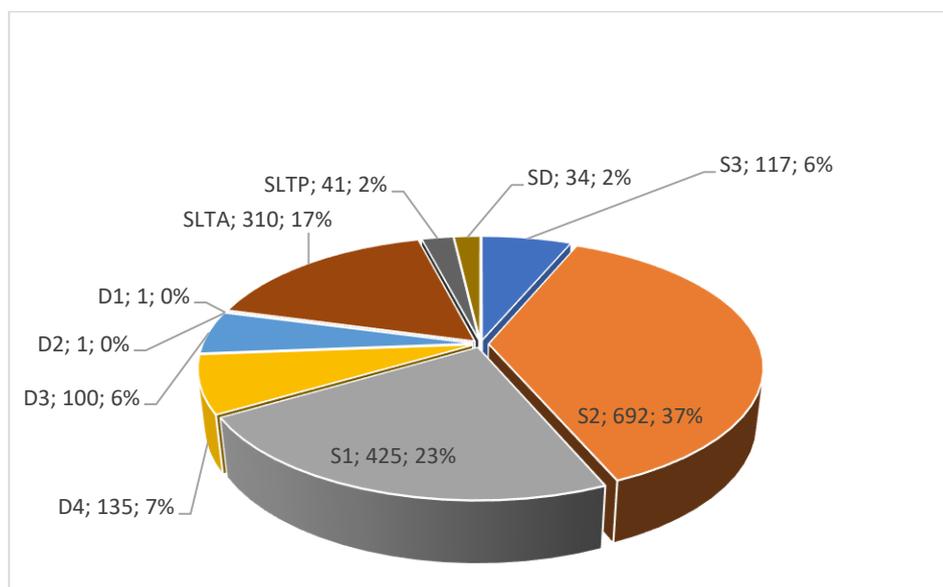
Komposisi pegawai BPPSDMP pada tahun 2022 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 29 orang; golongan II yaitu 271 orang; golongan III yaitu 1.212 orang, dan golongan IV yaitu 344 orang. Persentase pegawai BPPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 65%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 2%. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2022 pada berdasarkan golongan pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2022

- Rincian menurut pendidikan terdiri : S3 (Doktor) sebanyak 112 orang, S2 (magister) yaitu 679 orang, S1 (sarjana) yaitu 448 orang, D4 yaitu 135 orang, SM yaitu 0 orang, D3 yaitu 101 orang, D2 yaitu 1 orang, D1 yaitu 1 orang, SLTA yaitu 314 orang, SLTP yaitu 42 orang dan SD yaitu 36 orang. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2022 pada berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



## **G. Dukungan Anggaran BPPSDMP Tahun 2022**

Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah RP. **1.270.982.321.000,00**;  
Rincian Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022 terdiri dari anggaran :

1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Rp. 397.878.040.000,00;
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Rp. 90.526.056.000,00;
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Rp. 499.149.842.000,00; dan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 283.428.383.000,00;

Rincian pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022 pada tabel 1.

Tabel 1. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2022

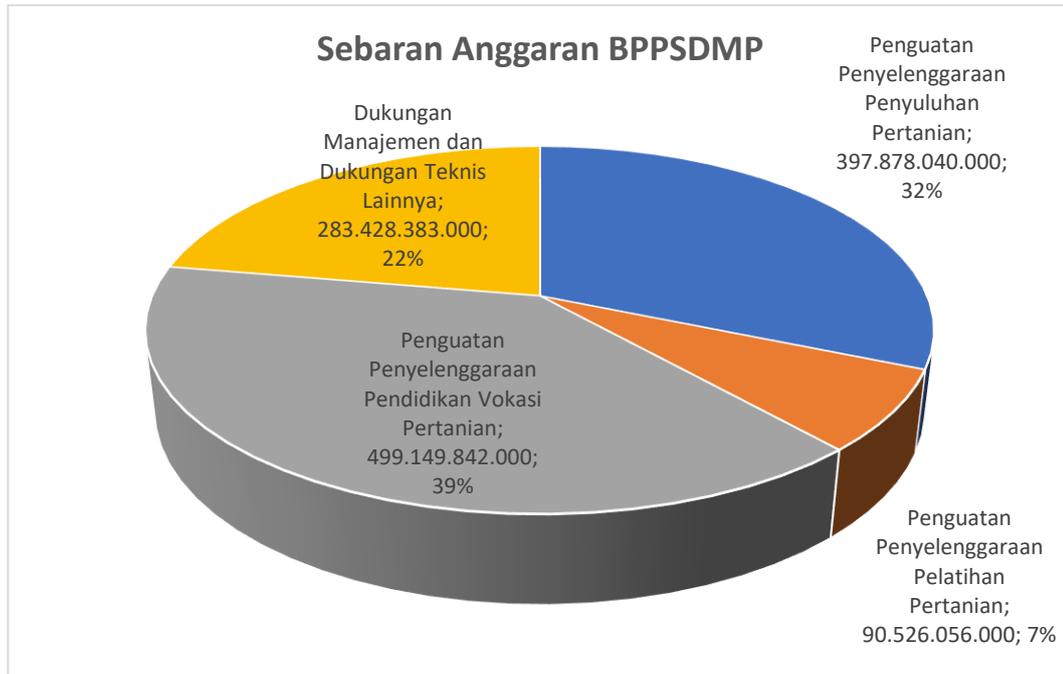
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	397.878.040.000	31,30
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.526.056.000	7,12
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	499.149.842.000	39,27
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	283.428.383.000	22,30
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>100,00</b>

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022 mulai dari yang tertinggi yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 39,27%, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 31,30%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 22,30% dan terendah adalah Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 7,12%. Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022 pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2022.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 226/Kpts/RC.020/I/10/2021. Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 278/Kpts/RC.020/I/11/2020 tentang Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024.

#### 1. Visi

BPPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Adapun pokok-pokok visi BPPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

**SDM pertanian yang profesional** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. **SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. **SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha** adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *entrepreneurship*, bekerja di sektor



pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. **Pertanian Maju** dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. **Pertanian Mandiri** dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. **Pertanian Modern** diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

## **2. Misi**

BPPSDMP menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- c. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- d. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.



### **3. Tujuan**

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen) ;
- b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen) ;
- c. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang) ;

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024).
2. Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian Nasional, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis :
  - a) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024).
  - b) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024).
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) sampai dengan 22% (tahun 2024).
4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta anggaran yang akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) sampai dengan nilai 34,25 (tahun 2024).



5. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

#### **4. Sasaran Program BPPSDMP**

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2.	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)
		3.	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4.	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya(%)
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5.	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)

#### **5. Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;



- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

## **6. Strategi**

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

### **a. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian**

Teknologi dan inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- 1) Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- 2) Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- 3) Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
- 4) Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP
- 5) Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- 6) Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.



b. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dengan langkah operasional sebagai berikut:

- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
- Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
- Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
- Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode *online* dan *offline* berbasis NIK;
- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
- Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
- Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
- Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
- Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.



- Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
  - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S
  - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
  - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- 2) Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
    - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
    - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
    - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
    - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
    - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
    - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA)
    - Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial;
- 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
  - Pengembangan *database* kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
  - Pengembangan *database* petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;



- Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
  - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian.
  - Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
  - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- 4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
  - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
  - Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
  - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
  - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian;
- 5) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
  - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
  - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
  - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
  - Pengawasan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;



- Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
- Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP

6) Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan *stakeholder* pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: a) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; b) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; c) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); d) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan e) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.



Salah satu tujuan gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dan pengendali yang mempercepat pengambilan keputusan dibidang pembangunan pertanian dan pangan.

#### 7) Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (a) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (a) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (b) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (c) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku



kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (d) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (e) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

### **c. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima**

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
  - Penerapan manajemen talenta ASN;
  - Peningkatan sistem merit ASN;
  - Penyederhanaan eselonisasi;
  - Penataan jabatan fungsional;
- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
  - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
  - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
  - Perluasan implementasi sistem integritas;



- Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
  - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- 4) Transformasi pelayanan publik, melalui: – Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
- Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
  - Penguatan ekosistem inovasi;
  - Penguatan pelayanan terpadu.

## **7. Program**

Pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I, BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan
- b. Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan).

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi II menjadi menjadi yaitu:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- b. Program Dukungan Manajemen;

Program Aksi BPPSDMP meliputi:

- a. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- b. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial;



- c. Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi Pendidikan, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Fungsi</b>
Kegiatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi

## **8. Kegiatan Utama BPPSDMP**

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi :

- a. Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- b. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- c. Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- d. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- f. Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri : *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*, Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI, Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*, Pemantapan sistem perencanaan dan



kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.

## 9. Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020-2024

Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP Tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PERTANIAN</b>								<b>993.176</b>	<b>985.265</b>	<b>754.176</b>	<b>1.884.286</b>	<b>2.261.143</b>	<b>BPPSDMP</b>
SP1	Termanfaatkannya teknologi pertanian												
	IKSP1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SP2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia												
	IKSP2	Persentase sumber daya manusia pertanian yang	%	60	75	80	85	90					
	IKSP3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di	%	65	75	80	85	90					
SP3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional												
	IKSP4	Persentase kelembagaan petani	%	18	19	20	21	22					
<b>Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian</b>								<b>489.612</b>	<b>479.693</b>	<b>298.663</b>	<b>800.607</b>	<b>960.728</b>	<b>Pusat Penyuluhan Pertanian</b>
SK1	Pemanfaatan teknologi pertanian												
	IKSK1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui												
	IKSK2	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	18	19	20	21	22					
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian</b>								<b>181.703</b>	<b>154.268</b>	<b>58.823</b>	<b>308.959</b>	<b>370.751</b>	<b>Pusat Pelatihan Pertanian</b>



**B P P S D M P**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan													
	IKSK1	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat	%	60	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian													
	IKSK2	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1-4)	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94						
<b>Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian</b>									321.861	351.305	396.690	774.720	929.664	Pusat Pendidikan Pertanian
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian													
	IKSK1	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang	%	65	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pendidikan pertanian													
	IKSK2	Persentase lembaga pendidikan vokasi	%	80	80	80	90	100						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan													
	IKSK3	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50						
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	BPPSDMP
SP1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	IKSP1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
SP2	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas													
	IKSP2	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP</b>									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	Sekretariat BPPSDMP
SK1	Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan													
	IKSK1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
	IKSK2	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal	Nilai	85	86	87	88	89						
	IKSK3	Level maturitas penyelenggaraan	Level	-	3	3	3	4						
	IKSK4	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BPPSDMP yang	%	70	75	80	85	90						
	IKSK5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan	%	75	80	85	90	90						



SK2	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP													
	IKSK6	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat BPPSDMP													
	IKSK7	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan sekretariat	Skala Likert (1-4)	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86						

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja BPPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala BPPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan tahun 2022 adalah :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1 Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	80%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80%
		3 Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	80%
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	20%
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,75 Nilai
5	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6 Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,40 Nilai

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Keragaan kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2021, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian menjadi empat kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

### **B. Capaian Kinerja BPPSDMP**

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2022. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2022 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang paling tinggi adalah Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan capaian 113,60% sedangkan capaian terkecil terdapat pada indikator nilai kinerja anggaran dengan capaian 100,25%.



Tabel 6. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	A Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	80	80,83	101,04	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	B Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	80	90,88	113,60	Sangat Berhasil
		C Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	80	84,46	105,57	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	D Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	20	20,25	101,23	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	E Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,75	34,95	103,55	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	F Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,40	90,63	100,25	Sangat Berhasil

Sumber data Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

## 1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

### a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi dan teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani karena petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi dan teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian



berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi dan inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan inovasi dan teknologi untuk peningkatan produksi serta produktivitas usahataniannya.

Diseminasi inovasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahataniannya.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahataniannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian Badan Litbang atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahataniannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**, telah dicapai sebanyak **18.631.940 petani** yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2022, dari **23.050.830 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2022.



Selanjutnya, untuk pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= (\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}) / \Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian) } 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= (18.631.940 / 23.050.830) \times 100\%$$
$$= 80,83 \%$$

**Persentase capaian kinerja diperoleh dari:**

$$= (80,83 / 80,00) \times 100$$
$$= 101,04 \% \text{ (sangat berhasil)}$$

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode, antara lain: Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran APBN maupun PHLN (SIMURP dan IPDMIP), bimbingan teknis, latihan, kunjungan, dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak **18.631.940 petani (80,83%)**, diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

1. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **17.600 petani.**
2. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) di 10 provinsi, 24 provinsi dan 117 BPP menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **84.240 petani;**



3. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) yang dilaksanakan di 712 BPP, 65 kabupaten, dan 14 provinsi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak **1.515.600 petani**.
4. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 37.810 Penyuluh Pertanian, menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi sebanyak **17.014.500 petani**. Fasilitasi BOP tersebut merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi dan teknologi. Output dari kegiatan diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang mau dan mampu menerapkan teknologi tersebut.

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

- 1) Aspek input
  - a. Pemupukan Berimbang
  - b. Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
  - c. Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
- 2) Aspek budidaya
  - a. Penerapan jarak tanam
  - b. Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
  - c. Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
  - d. Pengendalian hama terpadu
  - e. Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
  - f. Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
- 3) Aspek pengolahan dan *packaging*
  - a. Penggunaan *Rice Milling Unit*/RMU



b. Pengolahan pupuk kompos.

### **b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya**

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya di lapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkatkan kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

**(Nilai(( $\Sigma$  SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) :  
( $\Sigma$  total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian)  $\times$  100%)**

Cara pengambilan Data jumlah SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan:

1. Kunjungan lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau
2. Menggunakan system aplikasi online.



Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>Σ SDM yang mengikuti pelatihan</b>	<b>ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan</b>	<b>%</b>
1	PPMKP CIAWI	1592	1591	99,94
2	BBPKH CINAGARA	770	652	84,68
3	BBPP LEMBANG	549	510	92,90
4	BBPP KETINDAN	652	640	98,16
5	BBPP BATU	775	703	90,71
6	BBPP BATANGKALUKU	677	544	80,35
7	BBPP BINUANG	506	461	91,11
8	BBPP KUPANG	450	372	82,67
9	BPP JAMBI	419	368	87,83
10	BPP LAMPUNG	390	321	82,31
<b>TOTAL</b>		<b>6.780</b>	<b>6.162</b>	<b>90,88</b>

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 6.162 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 6.780 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2022 adalah :

$$= (6162 / 6780) \times 100\%$$

$$= 90,88\%$$



**Presentase capaian kinerja dihitung dari:**

$$= (90,88\% / 80) \times 100$$

$$= 113,60\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2022 adalah 80% dengan realisasi 90,88%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 113,60% (**Sangat Berhasil**).

**c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian**

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan yaitu Agustus T-1 dengan Agustus tahun berjalan.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian sebagai berikut:

$$= \left( \frac{\sum \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}}{\sum \text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}} \right) \times 100\%$$

$$= (1418 / 1.679) \times 100\%$$

$$= 84,46 \%$$

Persentase lulusan yang bekerja di bidang pertanian adalah:

$$= (84,46 / 80) \times 100\%$$

$$= 105,57\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2022 adalah 84,46% dari target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian persentase lulusan Pendidikan vokasi



pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah 105,57% (Sangat berhasil). Rekapitulasi persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian di UPT ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian

<b>No</b>	<b>Nama UPT</b>	<b>Jumlah Lulusan Yang Bekerja di bidang Pertanian</b>
1	Polbangtan Medan	162
2	Polbangtan Bogor	211
3	Polbangtan YOMA Kampus Magelang	112
4	Polbangtan YOMA Kampus Yogyakarta	116
5	Polbangtan Malang	191
6	Polbangtan Gowa	248
7	Polbangtan Manokwari	76
8	PEPI	0
9	SMK-PP Sembawa	136
10.	SMK-PP Banjarbaru	103
11	SMK-PP Kupang	63
	<b>Total</b>	<b>1418</b>

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diukur dari beberapa data yaitu:

1. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2021 s.d Agustus 2022) sebagai pembilang
2. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut
3. Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.



Adapun data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni.

Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain PNS dinas pertanian, wirausaha pertanian, perusahaan swasta dan BUMN yang bergerak di bidang pertanian (misalnya perkebunan sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (universitas negeri/swasta dan politeknik pertanian). Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang non pertanian.

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni. Selain itu partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal. (masukkan ke bab analisis factor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Monitoring berkala dilakukan setiap akhir bulan melalui google split sheet dan pertemuan online secara rutin bersama seluruh Unit Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.

#### **d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan



kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian.

Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (Gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan.

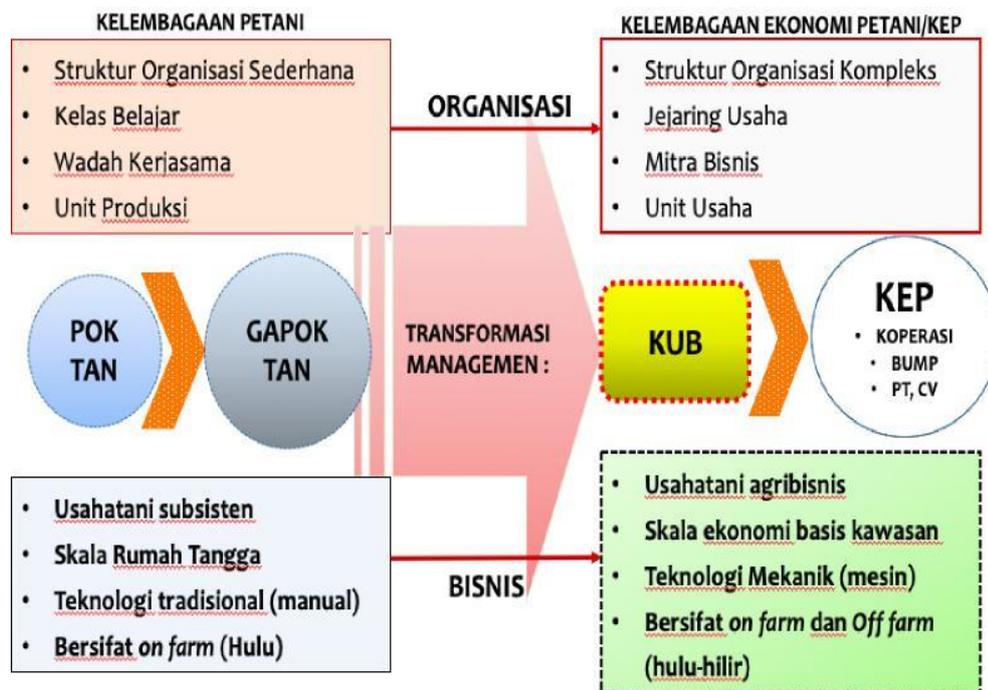
Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan



pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir.

Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;



- f) Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- g) Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk koperasi tani atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) lainnya. Indikator capaian diukur dari persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$= \frac{(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani})}{(\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan})} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus capaian IKU tersebut, maka diperoleh hasil data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2022, meliputi:

1. Data Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam aplikasi Simluhtan sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**, yaitu

a. Gapoktan : **64.555 Gapoktan**

b. Kelembagaan Ekonomi Petani : **13.070 KEP**

2. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, sebagai berikut :

$$= \frac{(13.070}{64.555)} \times 100\%$$

$$= \mathbf{20.25\%}$$

3. Persentase capaian kinerja adalah :

$$= \frac{(20.25}{20,00)} \times 100$$

$$= \mathbf{101.23\% \text{ (sangat berhasil)}}$$

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah **20.25%** dari target 20%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase



capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **101.23% (sangat berhasil)**.

Realisasi indikator kinerja Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya menjadi KEP yaitu sebanyak **13.070 KEP**. Bentuk- bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu: Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKMA), dan Lainnya.

Tabel 9. Rekapitulasi data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)  
sampai dengan 31 Desember 2022

No	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani						
			Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya	Tidak diketahui
1	Aceh	604	571	-	1	22	2	8	-
2	Bali	65	51	-	1	6	-	7	-
3	Banten	140	76	-	1	26	23	14	-
4	Bengkulu	108	48	1	-	5	39	15	-
5	D.I. Yogyakarta	448	94	-	-	233	87	34	-
6	DKI Jakarta	6	6	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	40	21	-	-	9	1	9	-
8	Jambi	313	107	1	1	139	43	22	-
9	Jawa Barat	1,387	328	3	6	517	219	314	-
10	Jawa Tengah	2,482	400	8	-	472	1,035	567	-
11	Jawa Timur	1,407	319	1	5	361	288	433	-
12	Kalimantan Barat	200	165	-	1	21	-	13	-
13	Kalimantan Selatan	305	29	-	2	135	24	115	-
14	Kalimantan Tengah	143	70	-	-	29	6	38	-
15	Kalimantan Timur	78	31	-	1	10	19	17	-
16	Kalimantan Utara	53	38	-	-	1	-	14	-
17	Kepulauan Bangka Belitung	31	25	1	-	2	-	3	-
18	Kepulauan Riau	19	15	-	-	2	-	2	-
19	Lampung	227	98	4	1	38	47	39	-
20	Maluku	28	17	-	-	8	1	2	-
21	Maluku Utara	17	-	1	-	1	-	15	-
22	Nusa Tenggara Barat	586	291	1	2	169	72	51	-
23	Nusa Tenggara Timur	427	133	-	2	252	16	24	-
24	Papua	38	3	-	-	32	-	3	-
25	Papua Barat	22	14	-	-	8	-	-	-



26	Riau	173	132	-	5	16	2	18	-
27	Sulawesi Barat	712	412	-	-	282	2	16	-
28	Sulawesi Selatan	763	242	-	1	327	67	126	-
29	Sulawesi Tengah	188	152	-	-	14	5	17	-
30	Sulawesi Tenggara	465	109	-	1	271	48	36	-
31	Sulawesi Utara	63	28	-	3	21	-	11	-
32	Sumatera Barat	309	107	-	-	114	61	27	-
33	Sumatera Selatan	682	166	-	-	153	76	287	-
34	Sumatera Utara	541	246	-	1	256	24	14	-
<b>J u m l a h</b>		<b>13,070</b>	<b>4,544</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>3,952</b>	<b>2,207</b>	<b>2,311</b>	<b>-</b>

Sumber data: Aplikasi Simluhtan periode 31 Desember 2022

**e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP**

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan. Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup PPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.



Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan penjumlahan penilaian capaian subkomponen perubahan dan capaian subkomponen reformasi. Secara rinci penilaian untuk masing masing subkomponen diuraikan sebagai berikut.

Rincian hasil capaian subkomponen perubahan dari penilaian komponen pengungkit pada Tabel 9.

Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Subkomponen Perubahan BPPSDMP tahun 2022

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95	97,5
4	Penataan Tatalaksana	1,00	1,00	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	100
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40	96
	<b>Jumlah</b>	<b>14,60</b>	<b>14,45</b>	<b>98,97</b>

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2022

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada subkomponen perubahan BPPSDMP tahun 2022 adalah **14,45**. Berdasarkan Tabel 9, BPPSDMP mencapai nilai tertinggi untuk komponen pengungkit penguatan akuntabilitas, dan nilai terendah untuk komponen pengungkit deregulasi kebijakan dan penataan tatalaksana.

Selanjutnya, hasil penilaian mandiri pada subkomponen reform ditampilkan pada Tabel 10.



Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Pada Subkomponen Reform BPPSDMP tahun 2022

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,42	81
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50	75
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,63	97
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100
<b>Jumlah</b>		<b>21,70</b>	<b>20,50</b>	<b>94,47</b>

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2022

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada subkomponen reform BPPSDMP tahun 2022 adalah **20,50**.

Berdasarkan hasil pengukuran dua subkomponen di atas, diperoleh hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal sebesar **34,95**. Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilaian capaian subkomponen perubahan dan capaian subkomponen reformasi, yaitu:

$$= 14,45 + 20,50 = 34,95$$

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai **33,50**. Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= (34,95/33,75) \times 100$$

$$= 103,55\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$



#### **f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi yang dilaksanakan oleh BPPSDMP diperoleh dari variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Sumber data dan pihak yang melakukan pengukuran NKA BPPSDMP adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup BPPSDMP.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Pasal 39 sebagai berikut:

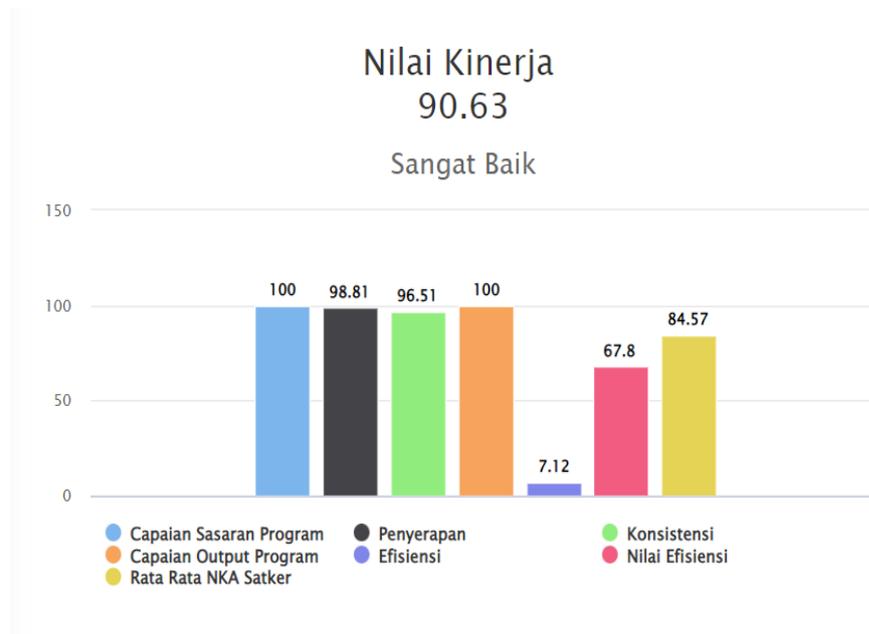
- 1)  $90\% > NK \leq 100\%$  kategori Sangat Baik
- 2)  $80\% > NK \leq 90\%$  kategori Baik
- 3)  $60\% > NK \leq 80\%$  kategori Cukup atau Normal
- 4)  $50\% > NK \leq 60\%$  kategori Kurang
- 5)  $NK \leq 50\%$  kategori Sangat Kurang

Realisasi NKA BPPSDMP tahun 2022 adalah **90,63** termasuk kategori nilai kinerja (NK) **Baik**. Berdasarkan aplikasi SMART Tahun 2022 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2022, total penyerapan anggaran (PA) mencapai 98,81%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (RPD) sebesar 96,51%, efisiensi sebesar 7,12 dengan Nilai Efisiensi sebesar 67,80%, capaian output program sebesar 100%, capaian sasaran program sebesar 100%, dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker sebesar 84,57%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan **Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPSDMP Tahun**



**2022 sebesar 90,63%**, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Dengan demikian, target NKA tahun 2022 sebesar 90,40% sudah tercapai, dan persentase capaian kinerja sebesar **100,25%** kategori **SANGAT BERHASIL**.

Pencapaian NKA BPPSDMP tahun 2022 ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022

Target NKA BPPSDMP tahun 2022 adalah **nilai 90,40** sehingga capaian kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 yaitu:

$$\begin{aligned} &= (90,63/90,40) \times 100 \\ &= \mathbf{100,25\% \text{ (Sangat Berhasil)}} \end{aligned}$$

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 3 (tiga) tahun 2020–2022**

Untuk mengetahui kecenderungan Realisasi Kinerja BPPSDMP mulai dari tahun 2020 – 2022 ditampilkan pada Tabel 11.



Tabel 12. Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,00	70,19	75,00	75,51	80,00	80,83
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	60,00	99,50	75,00	79,92	80,00	90,88
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	65,00	76,62	75,00	85,94	80,00	84,46
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya (%)	18,00	18,00	19,00	19,83	20,00	20,25
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	33,25	34,56	33,50	34,57	33,75	34,95
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,00	75,85	91,00	89,87	90,40	90,63

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2022

Tabel 11 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2020 – 2022) target 6 indikator kinerja BPPSDMP meningkat setiap tahunnya, namun tidak demikian dengan realisasinya. Tahun 2020 dan 2021, dari 6 indikator kinerja, hanya indikator Nilai Kinerja Anggaran yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 sebesar 75,85 jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 90,00; sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 89,87 lebih rendah dari target 91,00 meskipun sudah masuk dalam kategori berhasil. Namun



demikian, di tahun 20222 capaian Nilai Kinerja Anggaran telah mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu terdapat penurunan realisasi pada indicator persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya di tahun 2021 namun meningkat Kembali pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan dalam perhitungan pengukuran indicator kinerja utama, yang awalnya dihitung dari peserta yang lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi yang diubah menjadi peserta pelatihan yang telah menerapkan materi pelatihan.

### **3. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)**

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada Tabel 12.

Agar lebih mudah membandingkan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020-2022 dengan target 2023-2024, dilakukan proyeksi berdasarkan kecenderungan (trend) realisasi indicator kinerja. Perbandingan tersebut diprediksi bahwa target jangka menengah indicator kinerja akan dapat tercapai sampai dengan tahun 2024, kecuali untuk indicator kinerja anggaran. Jika mengikuti trend realisasi nilai kinerja anggaran, diprediksi target jangka menengah kemungkinan tidak tercapai. Namun, BPPSDMPP telah melakukan upaya upaya agar nilai kinerja anggaran dapat mencapai target. Hal ini terbukti dengan realisasi nilai kinerja anggaran yang mencapai target di tahun 2023.



Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020 - 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET JANGKA MENENGAH	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,19	75,51	80,83	85,00	90,00
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	99,50	79,92	90,88	85,00	90,00
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	76,62	85,94	84,46	85,00	90,00
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	19,83	20,25	21,00	22,00
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	34,95	34,00	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,63	90,60	90,80

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2022

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi**

##### **a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian**

Persentase capaian dari indikator kinerja petani yang menerapkan teknologi tahun 2022 adalah **101.04%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **80,83%**.

Penerapan teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usahatani yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh diseminasi teknologi karena pada hakikatnya merupakan proses



penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatani. Diseminasi sebagai proses penyebaran teknologi (hasil penelitian dan pengkajian) yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru sangat berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusahatani. Penerapan teknologi pertanian berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tepatnya peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan inovator dalam melakukan diseminasi/penyebaran teknologi pertanian kepada petani.

Penyuluh pertanian sebagai inovator berperan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi kepada petani melalui berbagai media dan metode penyuluhan pertanian sehingga outputnya adanya perubahan perilaku, sikap dan keterampilan petani dalam menerima serta menerapkan teknologi pertanian. Dengan penyebarluasan teknologi pertanian yang masif dan intensif oleh penyuluh pertanian kepada petani melalui berbagai kegiatan penyuluhan pertanian maka diinformasikan bahwa pada tahun 2022 sebanyak **18.631.940 petani** dapat menerapkan teknologi pertanian pada usahatani.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 80,83%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui:

- 1) Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP dan IPDMIP
- 2) Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai:



- a) Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya
  - b) Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usahataniya serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya
- 3) Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan petani secara daring dan luring
- 4) Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara online/daring melalui:
- a) Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 40 episode
  - b) Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) on The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 12 episode.
  - c) Podcast (NGepod) The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 48 volume.
  - d) Acara “ke Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian” (MSPP) yang sudah terselenggara sebanyak 48 episode



- 5) Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui:
- a) Website Cyber Extension yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya



- b) dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 200 materi
- c) Jurnal Suluhtani : 1 volume
- d) Media cetak : Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi



Tabloid Sinar Tani = 46.208 Eksemplar



Majalah Swadaya = 7.188 Eksemplar



Majalah Pilar = 7.188 Eksemplar

- 6) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP



Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian" terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Adanya Kebijakan Pemblokiran Anggaran/*Automatic Adjustment* (AA) untuk kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sehingga 2 (dua) kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal;
- 2) Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian di 34 provinsi karena pensiun dan meninggal;
- 3) Kurang tersedianya dukungan alat bantu penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya
- 4) Terdapat karakteristik kelompok petani yang dikategorikan sebagai penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang "kolot" (laggard) dalam mengadopsi teknologi
- 5) Terdapat karakteristik teknologi yang sulit dikomunikasikan, sulit diamati, dan sulit diterapkan karena faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan alam.

#### **b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya**

Persentase capaian dari indikator kinerja sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2022 adalah **113.60%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **90,88%**.

Keberhasilan tercapainya persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya didukung oleh:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK)



dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

## 2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat

Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

## 3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamakan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya.



Konvensi Nasional Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyembelihan Hewan Halal



Sertifikasi Inseminator Buatan (IB)

#### 4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan.



## 5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka *sharing experience*

Selain upaya, dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dan upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Adanya *refocusing* anggaran dan anggaran biaya tambahan, mengakibatkan target penyuluh dan petani yang akan ditingkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkurang jumlah.

Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk tetap meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani telah dilaksanakan program pelatihan *online* berbasis *Learning Management System* (LMS) dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud* (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.

**BERTANI on CLOUD**  
Vol 210  
**LOW COST PRECISION FARMING**  
LIVE STREAMING puslatan  
Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr  
Kepala Badan PPSDMP  
Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., MSI  
Kepala Bapeltan Lampung  
Kamis, 29 Desember 2022  
Pukul : 09.00- 10.30  
Zoom ID : 485 786 6217  
Pass: 123  
AA Gede Agung Wedhatama  
Ketua FK P4S Prov. Bali  
Link Materi :  
<https://bit.ly/Boc210>  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
Profesional Daya Saing Wirasaha



- 2) Purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indicator kinerja) dokumentasi purnawidya yang telah menerapkan materi pelatihan di tempatnya.

### **c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian**

Persentase capaian dari indikator lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2022 adalah **105.57%**, dari target sebesar 80% dan realisasi sebesar **84,46%**.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pembangunan Pertanian - Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktek, 30% teori serta model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan materi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).



Mahasiswa Polbangtan sedang mengikuti kegiatan *teaching factory*

3. Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian.
4. Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik di bidang pertanian. Siswa dan mahasiswa yang mengikuti program PWMP ketika lulus akan memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian.
5. Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri.



6. Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Setelah mengikuti program pelatihan/*retooling*, dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri terhadap siswa/mahasiswa untuk bisa direkrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian.
7. Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat di bidang pertanian yang dilakukan pada saat masuk Polbangtan dan SMK PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak awal perkuliahan memiliki jiwa cinta pertanian.

**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

*Kalian generasi milenial..*  
**AYO..!**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**TAHUN 2022**

**KULIAH DI**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN**  
**PERTANIAN (POLBANGTAN)**  
**DAN**  
**POLITEKNIK ENJINIRING**  
**PERTANIAN INDONESIA (PEPI)**

Polbangtan Bogor, Polbangtan Medan, Polbangtan Manokwari  
Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Malang  
Polbangtan Gowa, PEPI

**CARA PENDAFTARAN**

Kalian bisa langsung mengakses INFORMASI PMB Polbangtan/PEPI secara online di  
<https://pmb.pusdiktan.id>

**JALUR DAN JADWAL PENDAFTARAN**

**JALUR UNDANGAN**  
21 Februari - 5 Maret 2022  
Lulusan SMK-PP atau SMK Pertanian, Anak dari Petani Berprestasi, anak dari petani dikawasan strategis Kementan dan yang berada diwilayah 3T.

**JALUR TUGAS BELAJAR**  
21 Februari - 5 Maret 2022  
Pegawai Negeri sipil pertanian pusat atau daerah.

**JALUR UMUM**  
1 - 31 Maret 2022  
Lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan.

**JALUR KERJASAMA**  
1 - 31 Maret 2022  
Kerjasama antara Pemda/swasta dengan Polbangtan/PEPI.

**JALUR POSIM**  
25 - 30 Juni 2022  
Lulusan SMK Pertanian atau yang sederajat. Memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, keilmuan dan minat wirausaha.

**Profesional Daya Saling Wirausaha**  
<http://bppsdp.pertanian.go.id>

Design by anangp4402022



Factor yang menjadi kendala pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain: 1) jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni, 2) Partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Selain itu dilakukan monitoring setiap akhir bulan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

#### **d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**

Untuk mewujudkan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP.

Capaian dari indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2022 adalah **20,25% dari target 20%**, sehingga capaian kinerja sebesar **101.23**.

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengupayakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi: Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok



Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:

- Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
  - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
  - Memiliki rencana usaha;
  - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
  - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
  - Telah membangun kemitraan usaha.
- 2) Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
  - 3) Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
    - Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
    - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
    - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
    - Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
    - Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
  - 4) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui anggaran Proyek SIMURP di 117 BPP dan Proyek IPDMIP
  - 5) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cyber extension dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022;
  - 6) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang



dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu.

- 7) Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian dan lembaga Lain dan Pemerintah daerah dalam penumbuhkembangan korporasi.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

- a. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN;
- b. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
- c. Keterbatasan kelembagaan petani dan KEP dari aspek permodalan;
- d. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
- e. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
- f. Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar;
- g. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi serta pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara professional
- h. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi.



**e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP**

Persentase capaian dari indikator Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2022 adalah **103.55%**, dari target sebesar 33,75 dan realisasi sebesar **34,95%**.

Capaian nilai PMPRB BPPSDMP Tahun 2022 diperoleh melalui Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 pada 8 area perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 20 April 2022 melalui kesepakatan antara Assesor BPPSDMP dan Assesor Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah membentuk:

- a. Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 113/Kpts/OT.240/I/03/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 116/Kpts/OT.240/I/03/2022 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2022
- b. Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 10/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan ketetapan Kepala Badan Nomor 31/Kpts/OT.240/I/01/2022 tentang Rencana Kerja RB BPPSDMP Tahun 2022;



- c. Pembentukan Tim Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 28/Kpts/OT.240/I/01/2022 tentang Agen Perubahan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Perubahan yang dilakukan oleh Tim Agen Perubahan BPPSDMP melalui aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:
  - 1) Aplikasi Si Juru Tani dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
  - 2) D Corp Model dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
  - 3) Formula Ovis Tanaman Cabe dari Balai Besar Pelatihan pertanian Ketindan;
  - 4) Wednesday Free Training (WENNING) dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara; dan
  - 5) Aplikasi DIGITA dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi
2. Penataan Peraturan perundang-undangan
  - a. BPPSDMP bersama dengan Tim Panitia Antar Kementerian melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan Pembentukan Badan Otorita sebagai salah satu perwujudan untuk meningkatkan produktifitas pangan Indonesia sesuai dengan program presiden;
  - b. Untuk mengharmonisasikan perbedaan antara norma pengaturan mengenai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga ditetapkan Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2020 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan.



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dengan menyusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan diturunkan kembali dengan menyusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Penataan Ketatalaksanaan

- a. Reviu dan evaluasi SOP terkait Peta Proses Bisnis terkait dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Perpres Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dan dibentuknya Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian.
- b. Pengembangan e-Government yang dimiliki BPPSDMP sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengakses kebutuhan pengguna layanan.
- c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi public.
- d. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang andal.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatkan kemampuan ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif melalui pelatihan yang dilakukan secara webinar maupun secara *offline* pada Balai Pelatihan Pertanian BPPSDMP;
- b. Pembinaan dan Bimtek Program Ketrampilan Dasar Teknis Instruksional (Pekerti)/Applied Approach (AA) bagi Dosen.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Revisi Renstra BPPSDMP;



- b. Penyusunan Indikator Kinerja;
  - c. Pemutahiran Rencana Aksi;
  - d. Updating data Perjanjian Kinerja;
  - e. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat dan Laporan Kinerja BPPSDMP;
  - f. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
7. Penguatan Pengawasan

Menindaklanjuti Permen PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi ZI menuju WBK WBBM di Instansi Pemerintah dan hasil rapat evaluasi pelaksanaan zona integritas WBK/WBBM Tahun 2020, serta Sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021. BPPSDMP melalui surat Sekretaris Badan Nomor B-8335/KP.100/I.1/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 mengusulkan 7 Unit Pelaksana Teknis Calon WBK-WBBM sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>USULAN</b>
1	BBPP Batangkaluku	WBBM
2	PPMKP Ciawi	WBK
3	Polbangtan Yogyakarta-Magelang	WBK
4	Polbangtan Malang	WBK
5	BBPP Binuang	WBK
6	BBPP Batu	WBK
7	BPP Lampung	WBK

Berdasarkan seleksi dan penilaian dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) yang berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 29 Juli 2021, UPT BPPSDMP yang masuk Calon WBK-WBBM Nasional adalah:



<b>NO</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>NILAI</b>	<b>USULAN</b>
1	Polbangtan Yogyakarta-Magelang	91,55	WBK
2	PPMKP Ciawi	83,46	WBK
3	Polbangtan Medan	82,36	WBK
4	BBPP Ketindan	81,43	WBK

Keempat UPT di atas telah menerapkan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik sebanyak 2 unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP yang mewakili Kementerian Pertanian:
  - 1) Aplikasi Si Juru Tani (Polbangtan Yoma) yang mewakili BPPSDMP menjadi Inovasi Top 99 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 2) Aplikasi D'Corp Model (BBPP Binuang)
- b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unit kerja BPPSDMP;
- c. Melakukan evaluasi standar pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran agen perubahan Badan PPSDMP yang diharapkan mampu mengklarifikasi perubahan dan membuatnya lebih mudah dilakukan. Sebagai fasilitator, agen perubahan harus merancang sistem, alat, formulir, dan proses yang memungkinkan orang berhasil ketika mereka mengalami perubahan;



2. Mendorong setiap Unit Pelaksana Teknis untuk mengembangkan inovasi yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing;
3. Menyusun SOP kompensasi jenis pelayanan pelatihan dan pendidikan lingkup BPPSDMP serta jenis kompensasinya; menambah jumlah survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan dan pendidikan minimal 4 kali selama setahun;
4. Meningkatkan aktivitas dalam membuat perubahan/inovasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pelatihan dan Pendidikan;
5. Melakukan pembinaan kepada pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan *punishment* disesuaikan dengan PP No. 94 Tahun 2021;
6. Melakukan upaya peningkatan nilai capaian sasaran kinerja dari Nilai Kinerja.

#### **f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP**

Persentase capaian dari indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah **100.25%**, dari target sebesar 9040% dan realisasi sebesar **100,25%**.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data terkait pencapaian nilai kinerja:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin/petugas monev ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/ perencanaan, bahkan



sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP), seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH, Perkebunan dan PSP;

- 3) Data capaian output integrasi dari SAS/SAKTI kadang bersifat anomali sehingga masih diperlukan koreksi terhadap data tersebut;
- 4) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 18 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan belum mengacunya pelaksanaan kegiatan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) dan terlambat melakukan revisi RPD pada halaman lembar III DIPA;
- 5) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Dari permasalahan di atas, dalam rangka perbaikan nilai kinerja pada tahun yang akan datang maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan PPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya (tahun 2022 hanya terselenggara 1 kali karena pemotongan anggaran, sehingga semester II hanya dilaksanakan secara *online*), namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu dilakukan koreksi data pada aplikasi SMART pada menu yang telah tersedia setelah integrasi data masuk ke dalam SMART setiap bulannya;



- 4) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD (Rencana Penarikan Dana), agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 5) Memaksimalkan capaian RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 6) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek CRO dan konsistensi.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Berdasarkan aplikasi SMART yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2022, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2022 yaitu 90,63% dari target nilai 90.40.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran > 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran > 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran > 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran > 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran  $\leq$  50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMP tahun 2022 berdasarkan aplikasi SMART termasuk dalam kategori nilai kinerja **Sangat baik (NK Anggaran >90%)**. Realisasi kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Nilai 90,63 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Capaian Ouput Program = 100
- b. Penyerapan = 98,81



- c. Konsistensi = 96,51
- d. Efisiensi = 7,12
- e. Capaian Sasaran Program = 100
- f. Rata-rata NKA Satker = 84,57
- g. Nilai Efisiensi = 67,8

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK Nomor 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan berikut :

**Rumus :**

$$\text{NE} = 50\% + [E/(20 \times 50)]$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%. Persentase capaian kinerja BPPSDMP tahun 2022 dalam hal efisiensi adalah mencapai -20%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} \text{NE} &= 50\% + [7,12\% / (20 \times 50)] \\ &= 0,5 + [0,0712 / (20 \times 50)] \\ &= 0,5 + 0,178 \\ &= 0,678 \text{ atau } 67,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BPPSDMP pada tahun 2022 adalah 67,8% (**Cukup**).

### **C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2022**

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Rp **1.255.884.425.497,-** dari pagu sebesar Rp **1.270.982.321.000,-**. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2022 adalah **98,81%**.

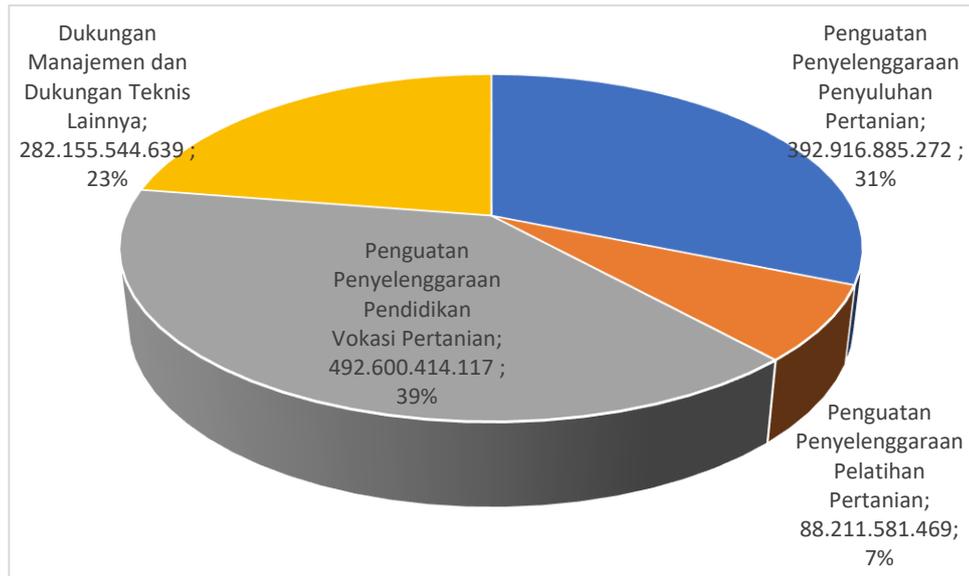


Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 392.916.885.272,-; Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 88.211.581.469,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 492.600.414.117,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 282.155.544.639,-. Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 ditampilkan di Tabel 13 dan Gambar 12.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan	397.878.040.000	392.916.885.272	98,75
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.526.056.000	88.211.581.469	97,44
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	499.149.842.000	492.600.414.117	98,69
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	283.428.383.000	282.155.544.639	99,55
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81</b>

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP tahun 2022



Gambar 6. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2022

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2022 yang tertinggi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP yaitu 99,55%, sedangkan terendah adalah pada Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu 97,44%. Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

### 1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	123.581.147.000	121.613.538.998	98,41
2	Dekonsentrasi (DK)	274.296.893.000	271.303.346.274	98,91
Total		<b>397.878.040.000</b>	<b>392.916.885.272</b>	<b>98,75</b>

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022



Tabel 14 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2022 terbagi atas dua kewenangan yaitu kewenangan kantor pusat dalam hal ini Pusat Penyuluhan Pertanian dan Dekonsentrasi. Tahun 2022 realisasi anggaran kewenangan dekonstrasi lebih tinggi dari yaitu 98,91 daripada realisasi Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 98,41%.

## **2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian**

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP)	53.112.491.000	51.068.268.090	96,15%
2	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	37.413.565.000	37.143.313.379	99,28%
Total		<b>90.526.056.000</b>	<b>88.211.581.469</b>	<b>97,44%</b>

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa UPT Pelatihan (Kantor Daerah) mencapai realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 99,28% dari kantor pusat (Pusat Pelatihan Pertanian) sebesar 96,15%.

## **3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian**

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 16.



Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	58.635.871.000	57.635.944.478	98,29
2	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	440.513.971.000	434.964.469.639	98,74
	<b>TOTAL</b>	<b>499.149.842.000</b>	<b>492.600.414.117</b>	<b>98,69</b>

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2022 di UPT Pendidikan/Kantor Daerah (KD) yaitu 98,74% lebih tinggi daripada realisasi anggaran di Pusat Pendidikan Pertanian /Kantor Pusat (KP) yaitu 98,29%.

#### **4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP**

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara rinci ditampilkan pada Tabel 17.

Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2022

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Badan PPSDMP/Kantor Pusat (KP)	58.893.120.000	58.695.642.081	99,66
2	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	15.012.890.000	14.983.155.080	99,80
3	UPT Pelatihan/ Kantor Daerah (KD)	99.239.320.000	98.875.451.224	99,63
4	UPT Pendidikan/ Kantor Daerah (KD)	110.283.053.000	109.601.296.254	99,38
	<b>Total</b>	<b>283.428.383.000</b>	<b>282.155.544.639</b>	<b>99,55</b>

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2022



Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2022 yang tertinggi adalah UPT Pendidikan/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,80%, sedangkan yang terendah adalah UPT Pendidikan/Kantor Pusat (KD) yaitu 99,38%.



## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022. Sasaran program BPPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2022 adalah :

1. Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2022 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **101,04%**; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **113,60%**; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu **105,57%**; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar **101,23 %**; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu **103,55%**; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu **100,25 %**.
2. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 adalah Rp **1.255.884.425.497,-** atau sebesar **98,81%** dari pagu Rp **1.270.982.321.000,-**. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2022 berdasarkan kegiatan adalah: a) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 392.916.885.272,-; b) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 88.211.581.469,-; c) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 492.600.414.117,-; serta d) Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 282.155.544.639,-.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan tercapainya kinerja BPPSDMP tahun 2022 meliputi :
  - a. Sasaran program Persentase petani yang menerapkan teknologi.  
Faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi kinerja melampaui



target yaitu sebesar 80,83% yaitu: 1) Dukungan Kementerian Pertanian dalam optimalisasi peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi melalui penyediaan sarana IT bagi BPP; 2) Penderasan informasi dan materi penyuluhan pertanian serta diseminasi inovasi teknologi yang dilakukan melalui berbagai media; 3) Fasilitasi pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi bagi 34 provinsi, berupa fasilitasi anggaran kegiatan Sekolah Lapangan (SL), fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Honorarium dan BPJS bagi THL-TB PP, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), pengawalan dan pendampingan secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, dan dukungan manajemen satker; 4) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dll; 5) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension*; 6) Pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian secara berjenjang dari mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa melalui kegiatan: latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan *offline* dan *online*; serta 7) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

b. Sasaran program Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 90,88% sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.



Keberhasilan tersebut didukung oleh: 1) Identifikasi kebutuhan pelatihan; 2) Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat; 3) Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara); 4) Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung; serta 5) Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan.

- Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 84,46%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian didukung oleh: 1) Adanya komitmen Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan; 2) Proses pembelajaran menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktek, 30% teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory*; 3) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dari narasumber berpengalaman; 4) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif; 5) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian; 6) Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industry; serta 7) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat di bidang pertanian;

- c. Sasaran program Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 20,25%, sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%.

Capaian tersebut diperoleh dari : 1) Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada petugas pendamping; 2) Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya



penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi; 3) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak; 4) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/*online*; serta 5). Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

- d. Sasaran program terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima dengan indikator kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP tahun 2022 sangat berhasil mencapai target dengan nilai 34,95 dari target nilai 33,75 atau tercapai 103,55% karena didukung dengan transformasi, pengembangan dan perbaikan pada berbagai aspek yaitu: area manajemen perubahan, area deregulasi kebijakan penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm apartur, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Sasaran program terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran realisasinya 90,63% dari target 90,20%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART BPPSDMP tahun 2022 mencapai 100,25% (sangat berhasil).

Capaian Output Program (COP) telah mencapai 100,00%, pada aspek ini tidak ada indikator yang statusnya tertunda/pendang, sehingga capaian bisa maksimal.

Penyerapan adalah realisasi anggaran lingkup BPPSDMP yang sudah mencapai 98,81%. Efisiensi berada pada batas 7,12 atau efisien dikarenakan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran (0 s.d. -20 tidak efisien; 0,1 s.d. 20 Efisien), dengan Nilai Efisiensi 67,8%. Hal ini menunjukkan semua aspek sudah tercapai secara optimal, capaian kegiatan fisik sebesar 100%,



beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya hanya sedikit.

## **LANGKAH DIMASA MENDATANG YANG AKAN DILAKSANAKAN ORGANISASI UNTUK MENINGKATAN KINERJANYA**

A. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian.
- 2) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian
- 3) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/ *online*.
- 4) Penyebar luasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) dengan alokasi pembiayaan Dana melalui Dekonsentrasi;
- 5) Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; c) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
- 6) Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 7) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;



- 8) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi
- B. Upaya dalam kegiatan pembentukan KEP yang akan dilakukan kedepan adalah: 1) Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP; 2) Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya; 3) Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi; dan 4) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian tetap membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
- C. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah:
- 1) Pusat pelatihan pertanian akan membuat SOP pelaporan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan Pertanian sehingga data yang tersaji didalam laporan kinerja akan sama antara Pusat pelatihan dan UPT Pelatihan;
  - 2) Pusat pelatihan pelatihan akan menyusun manual perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2023 untuk



memudahkan dan menyamakan cara menyusun capaian IKSK antar UPT;

- 3) Pusat Pelatihan Pertanian akan mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pelaporan capaian kinerja Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan.

D. Dalam rangka mencapai sasaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2022, maka upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan serta menyusun *time schedule* pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dalam rangka peningkatan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan secara utuh Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan DUDI;
- 2) Menjalin kerja sama yang menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan user (pengguna) lulusan yaitu Lembaga Pemerintah, Perusahaan BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta dan lembaga kewirausahaan. Kerja sama yang erat bisa berupa program magang, kunjungan studi, stadium general atau karya ilmiah;
- 3) Lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran terhadap lulusannya untuk memudahkan lembaga pendidikan mendeteksi keterpakaian lulusannya;
- 4) Penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara alumni dan pihak sekolah. Sosial media ini bila perlu dikelola oleh pihak sekolah yang memiliki peran humas (Hubungan Masyarakat). Bentuk penggunaan media misalnya membuat grup Facebook yang memberi kesempatan berbagai alumni dan



mahasiswa dan siswa berintekasi dan meng-update info lowongan kerja dan tip-tip sukses di dunia kerja;

- 5) Menumbuhkan program kewirausahaan bagi mahasiswa dan siswa melalui program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).

E. Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang untuk meningkatkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan PPSDMP tahun 2022.

- 1) Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 2) Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP;
- 3) Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian.

F. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BPPSDMP di tahun mendatang maka Sekretariat Badan PPSDMP akan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya, yang didukung dengan pemantauan dan pembinaan secara intensif dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- b. Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- c. Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SMART, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;



- d. Perlu memaksimalkan ketercapaian Rincian Output (RO) dengan adanya efisiensi biaya;
- e. Mendorong peningkatan Nilai Kinerja satker terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.



# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Nursyamsi  
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Desember 2022

Pihak Kedua,



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama,



Dedi Nursyamsi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator	Target	
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	80	%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	80	%
		3	Persentase Lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	80	%
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	20	%
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	33.75	Nilai
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90.40	Nilai

Kegiatan	Anggaran
<b>I. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi</b>	<b>Rp. 987.586.983.000</b>
1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	Rp. 397.878.040.000
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan pertanian	Rp. 90.559.101.000
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp. 499.149.842.000
<b>II. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 283.395.338.000</b>
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 283.395.338.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.270.982.321.000</b>

Jakarta, 7 Desember 2022

Menteri Pertanian,

Kepala Badan,



**Syahrul Yasin Limpo**



**Dedi Nursyamsi**



Kepala Badan  
Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr



Sekretaris Badan  
Dr. Ir. Siti Munifah, M. Si



Kepala Pusat Pendidikan  
Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP



Kepala Pusat Penyuluhan  
Ir. Bustanul Arifin Caya M. DM



Kepala Pusat Pelatihan  
Dr. Ir. Leli Nuryati, M. Sc

- 6 POLBANGTAN
- 1 PEPI
- 3 SMK PP

- 8 Balai Besar Pelatihan
- 2 Balai Pelatihan



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG  
Per Desember 2022**

No	Unit Kerja	Golongan																				Jml	
		I				Total	II				Total	III				Total	IV						Total
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e		
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	-	2	1	4	5	12	19	21	14	28	82	13	5	-	1	-	19	113
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	4	7	16	34	14	5	1	3	2	25	62
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	7	12	28	2	2	1	-	-	5	34
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	4	13	25	8	1	1	-	-	10	37
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	8	8	8	3	15	11	37	14	24	9	8	55	11	3	4	2	4	24	124
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	12	25	9	23	69	5	1	-	-	-	6	81
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	-	-	-	6	6	8	2	4	9	23	10	20	17	27	74	10	4	7	4	1	26	129
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	-	-	-	2	2	-	3	5	16	24	16	35	23	53	127	22	4	2	1	-	29	182
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	-	-	-	1	1	4	2	9	7	22	18	22	21	36	97	6	8	3	-	-	17	137
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	14	16	19	23	72	7	9	3	1	-	20	94
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	-	-	-	2	2	1	1	4	2	8	8	16	12	14	50	11	1	-	-	-	12	72
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	10	13	18	22	63	11	-	5	1	1	18	92
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	-	5	5	-	2	2	4	8	4	6	16	7	33	8	3	1	1	1	14	60
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	1	1	1	1	2	10	14	6	16	5	12	39	10	5	1	2	-	18	72
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	-	1	1	-	2	1	5	8	4	16	13	13	46	7	4	6	-	1	18	73
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	-	-	-	1	2	4	4	11	6	20	6	10	42	10	4	1	-	-	15	68
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	3	1	4	5	13	6	8	4	7	25	4	2	2	-	-	8	46
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	-	-	3	-	-	7	10	7	11	6	10	34	6	1	1	-	1	9	53
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	2	2	-	-	3	10	13	3	16	11	11	41	5	3	2	1	-	11	67
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	1	1	-	3	5	1	9	1	17	9	10	37	3	2	2	2	-	9	56
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	1	2	1	9	13	6	20	11	14	51	6	3	-	-	-	9	73
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	1	5	4	10	4	15	8	6	33	4	1	-	-	-	5	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	8	10	5	11	34	5	-	-	-	-	5	46
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	7	5	21	6	3	1	1	-	11	36
<b>TOTAL</b>		-	-	-	29	29	32	26	79	134	271	194	366	261	391	1,212	194	74	44	20	12	344	1,856

Jakarta, Desember 2022  
Subkoordinator Kepegawaian/  
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.  
NIP. 197607142002121002



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**Per Desember 2022**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	57	56	113
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	29	33	62
4	Pusat Pendidikan Pertanian	14	20	34
5	Pusat Pelatihan Pertanian	15	22	37
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	85	39	124
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	38	43	81
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	79	50	129
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	105	77	182
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	87	50	137
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	59	35	94
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	41	31	72
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	50	42	92
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	40	20	60
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	46	26	72
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	39	34	73
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	44	24	68
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	31	15	46
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	29	24	53
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	41	26	67
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	33	23	56
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	45	28	73
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	30	18	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	33	13	46
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	27	9	36
<b>TOTAL PEGAWAI BPPSDMP</b>		<b>1,098</b>	<b>758</b>	<b>1,856</b>

Jakarta, Desember 2022  
Subkoordinator Kepegawaian/  
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.  
NIP. 197607142002121002



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
Per Desember 2022**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	32	42	1	-	11	-	-	21	2	2	113
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	26	29	-	-	1	-	-	6	-	-	62
4	Pusat Pendidikan Pertanian	3	14	11	-	-	2	-	1	3	-	-	34
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	17	12	-	-	2	-	-	4	-	-	37
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	6	28	20	-	-	3	1	-	43	15	8	124
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	6	38	17	4	-	4	-	-	12	-	-	81
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	19	42	13	13	-	6	-	-	25	5	6	129
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	18	61	34	24	-	11	-	-	29	3	2	182
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	20	46	16	13	-	10	-	-	31	1	-	137
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	8	51	14	19	-	1	-	-	1	-	-	94
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	5	30	18	9	-	6	-	-	-	1	3	72
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	2	44	23	3	-	5	-	-	15	-	-	92
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	1	23	17	2	-	4	-	-	6	2	5	60
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	6	29	10	7	-	3	-	-	15	1	1	72
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	4	24	23	8	-	4	-	-	8	1	1	73
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	28	19	1	-	1	-	-	16	3	-	68
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	2	18	8	2	-	4	-	-	8	3	1	46
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	22	11	5	-	3	-	-	10	-	2	53
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	1	24	17	7	-	1	-	-	15	1	1	67
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	2	22	17	-	-	3	-	-	10	1	1	56
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	1	24	24	5	-	3	-	-	15	-	1	73
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	15	12	4	-	4	-	-	12	1	-	48
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	16	13	8	-	3	-	-	5	1	-	46
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	8	18	5	-	-	5	-	-	-	-	-	36
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>692</b>	<b>425</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>310</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>1,856</b>

Jakarta, Desember 2022  
Subkoordinator Kepegawaian/  
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.  
NIP. 197607142002121002

**PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP  
PERIODE SD 31 DESEMBER 2022**

**I REALISASI KEGIATAN UTAMA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.526.056.000	88.211.581.469	97,44%	2.314.474.531	2,56%
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	397.878.040.000	392.916.885.272	98,75%	4.961.154.728	1,25%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	499.149.842.000	492.600.414.117	98,69%	6.549.427.883	1,31%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	283.428.383.000	282.155.544.639	99,55%	1.272.838.361	0,45%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

**II REALISASI BELANJA**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI	135.874.163.000	135.419.112.941	99,67%	455.050.059	0,33%
2	BELANJA BARANG	1.032.021.478.000	1.017.933.607.056	98,63%	14.087.870.944	1,37%
3	BELANJA MODAL	103.086.680.000	102.531.705.500	99,46%	554.974.500	0,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

**III REALISASI KEWENANGAN**

NO	JENIS KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	KANTOR PUSAT	309.235.519.000	303.996.548.727	98,31%	5.238.970.273	1,69%
2	KANTOR DAERAH	687.449.909.000	680.584.530.496	99,00%	6.865.378.504	1,00%
3	DEKONSENTRASI	274.296.893.000	271.303.346.274	98,91%	2.993.546.726	1,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

**IV REALISASI SUMBER DANA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	RUPIAH MURNI	858.827.861.000	850.639.913.618	99,05%	8.187.947.382	0,95%
2	PINJAMAN LUAR NEGERI	380.859.751.000	374.507.589.354	98,33%	6.352.161.646	1,67%
3	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	13.434.709.000	13.116.109.838	97,63%	318.599.162	2,37%
4	HIBAH LUAR NEGERI	7.710.000.000	7.488.749.823	97,13%	221.250.177	2,87%
5	SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	10.150.000.000	10.132.062.864	99,82%	17.937.136	0,18%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

**V REALISASI KEGIATAN PER KEWENANGAN**

NO	KEGIATAN / KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
<b>1</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>397.878.040.000</b>	<b>392.916.885.272</b>	<b>98,75%</b>	<b>4.961.154.728</b>	<b>1,25%</b>
a	Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	123.581.147.000	121.613.538.998	98,41%	1.967.608.002	1,59%
b	Dekonsentrasi (DK)	274.296.893.000	271.303.346.274	98,91%	2.993.546.726	1,09%
<b>2</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN</b>	<b>90.526.056.000</b>	<b>88.211.581.469</b>	<b>97,44%</b>	<b>2.314.474.531</b>	<b>2,56%</b>
a	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	53.112.491.000	51.068.268.090	96,15%	2.044.222.910	3,85%
b	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	37.413.565.000	37.143.313.379	99,28%	270.251.621	0,72%
<b>3</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN</b>	<b>499.149.842.000</b>	<b>492.600.414.117</b>	<b>98,69%</b>	<b>6.549.427.883</b>	<b>1,31%</b>
a	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	58.635.871.000	57.635.944.478	98,29%	999.926.522	1,71%
b	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	440.513.971.000	434.964.469.639	98,74%	5.549.501.361	1,26%
<b>4</b>	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP</b>	<b>283.428.383.000</b>	<b>282.155.544.639</b>	<b>99,55%</b>	<b>1.272.838.361</b>	<b>0,45%</b>
a	Sekretariat Badan PPSDMP / Kantor Pusat (KP)	58.893.120.000	58.695.642.081	99,66%	197.477.919	0,34%
b	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	15.012.890.000	14.983.155.080	99,80%	29.734.920	0,20%
c	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	99.239.320.000	98.875.451.224	99,63%	363.868.776	0,37%
d	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	110.283.053.000	109.601.296.254	99,38%	681.756.746	0,62%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

**VI REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	120040   BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	8.812.950.000	8.723.652.380	98,99%	89.297.620	1,01%
2	237200   PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI	28.769.101.000	28.701.415.146	99,76%	67.685.854	0,24%
3	239640   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	8.905.685.000	8.736.345.280	98,10%	169.339.720	1,90%
4	239654   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	13.350.318.000	13.307.097.475	99,68%	43.220.525	0,32%
5	239661   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	16.424.691.000	16.411.116.105	99,92%	13.574.895	0,08%
6	239675   BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	14.512.732.000	14.460.673.340	99,64%	52.058.660	0,36%
7	239701   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	14.212.536.000	14.140.666.896	99,49%	71.869.104	0,51%
8	394771   BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	10.455.960.000	10.411.571.818	99,58%	44.388.182	0,42%
9	412075   BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	11.927.759.000	11.850.490.315	99,35%	77.268.685	0,65%
10	412081   BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	9.281.153.000	9.275.735.848	99,94%	5.417.152	0,06%
	<b>TOTAL</b>	<b>136.652.885.000</b>	<b>136.018.764.603</b>	<b>99,54%</b>	<b>634.120.397</b>	<b>0,46%</b>

**VII REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	412005   POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	77.517.326.000	76.989.498.797	99,32%	527.827.203	0,68%
2	417402   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	80.268.805.000	79.892.321.717	99,53%	376.483.283	0,47%
3	417405   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	29.222.732.000	28.744.955.929	98,37%	477.776.071	1,63%
4	417407   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	33.103.827.000	32.584.670.163	98,43%	519.156.837	1,57%
5	417409   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	100.951.768.000	98.348.118.800	97,42%	2.603.649.200	2,58%
6	417411   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	49.343.108.000	48.667.525.046	98,63%	675.582.954	1,37%
7	417413   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	79.743.558.000	79.134.698.369	99,24%	608.859.631	0,76%
8	417428   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	27.929.227.000	27.874.362.000	99,80%	54.865.000	0,20%
9	237814   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	17.458.429.000	17.308.659.858	99,14%	149.769.142	0,86%
10	237924   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	43.310.470.000	43.145.709.228	99,62%	164.760.772	0,38%
11	412101   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	11.947.774.000	11.875.245.986	99,39%	72.528.014	0,61%
	<b>TOTAL</b>	<b>550.797.024.000</b>	<b>544.565.765.893</b>	<b>98,87%</b>	<b>6.231.258.107</b>	<b>1,13%</b>

**VIII REALISASI SATKER KANTOR PUSAT**

NO	ESELON II	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	53.112.491.000	51.068.268.090	96,15%	2.044.222.910	3,85%
2	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	123.581.147.000	121.613.538.998	98,41%	1.967.608.002	1,59%
3	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	58.893.120.000	58.695.642.081	99,66%	197.477.919	0,34%
4	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	73.648.761.000	72.619.099.558	98,60%	1.029.661.442	1,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>309.235.519.000</b>	<b>303.996.548.727</b>	<b>98,31%</b>	<b>5.238.970.273</b>	<b>1,69%</b>

## IX REALISASI SATKER DEKONSENTRASI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
32	418021   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.153.640.000	24.150.525.364	99,99%	3.114.636	0,01%
22	417999   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	16.112.349.000	16.107.456.667	99,97%	4.892.333	0,03%
31	418020   DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	6.467.980.000	6.465.813.768	99,97%	2.166.232	0,03%
34	418024   DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4.299.891.000	4.297.827.601	99,95%	2.063.399	0,05%
1	019071   DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	579.922.000	579.527.588	99,93%	394.412	0,07%
27	418013   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.073.139.000	5.069.239.000	99,92%	3.900.000	0,08%
9	239224   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11.023.692.000	11.013.227.825	99,91%	10.464.175	0,09%
18	403458   DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	4.603.127.000	4.596.358.600	99,85%	6.768.400	0,15%
29	418018   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	6.995.210.000	6.981.017.597	99,80%	14.192.403	0,20%
8	229030   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3.000.411.000	2.993.523.132	99,77%	6.887.868	0,23%
15	403452   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	6.009.575.000	5.991.575.000	99,70%	18.000.000	0,30%
5	099436   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3.540.142.000	3.529.173.884	99,69%	10.968.116	0,31%
30	418019   DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	393.762.000	392.437.689	99,66%	1.324.311	0,34%
10	280031   DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	3.395.280.000	3.383.640.000	99,66%	11.640.000	0,34%
14	403450   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	4.534.520.000	4.517.830.000	99,63%	16.690.000	0,37%
12	339059   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	3.133.776.000	3.121.660.000	99,61%	12.116.000	0,39%
28	418014   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	5.832.584.000	5.808.106.567	99,58%	24.477.433	0,42%
19	417675   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.216.300.000	1.210.674.255	99,54%	5.625.745	0,46%
17	403457   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.132.461.000	14.058.211.352	99,47%	74.249.648	0,53%
3	049062   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	1.721.875.000	1.712.454.752	99,45%	9.420.248	0,55%
11	305143   DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.115.580.000	1.108.860.000	99,40%	6.720.000	0,60%
7	169065   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.489.811.000	3.462.011.428	99,20%	27.799.572	0,80%
25	418010   DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3.504.426.000	3.475.662.000	99,18%	28.764.000	0,82%
24	418009   DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.720.412.000	9.618.154.478	98,95%	102.257.522	1,05%
4	050040   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	17.257.344.000	17.074.205.310	98,94%	183.138.690	1,06%
21	417998   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	12.211.025.000	12.044.774.480	98,64%	166.250.520	1,36%
16	403455   DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	2.657.837.000	2.619.572.838	98,56%	38.264.162	1,44%
26	418011   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	34.987.762.000	34.457.494.606	98,48%	530.267.394	1,52%
13	345105   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.010.811.000	2.947.136.425	97,89%	63.674.575	2,11%
6	140042   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5.130.722.000	5.013.938.430	97,72%	116.783.570	2,28%
33	418022   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	7.314.396.000	7.136.235.800	97,56%	178.160.200	2,44%
23	418000   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	6.735.992.000	6.566.511.600	97,48%	169.480.400	2,52%
2	029175   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	31.290.890.000	30.418.276.928	97,21%	872.613.072	2,79%
20	417996   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9.650.249.000	9.380.231.310	97,20%	270.017.690	2,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>274.296.893.000</b>	<b>271.303.346.274</b>	<b>98,91%</b>	<b>2.993.546.726</b>	<b>1,09%</b>



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 104/Kpts/PW.160/I/03/2022  
TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu melaksanakan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/ 10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

- a. menyiapkan dan menyusun TOR/Proposal sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

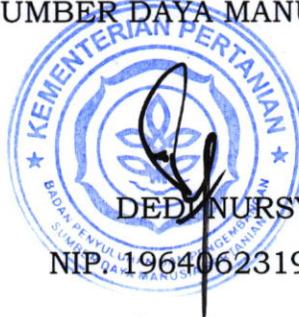
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Maret 2022

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 104/Kpts/PW.160/I/03/2022  
TANGGAL : 07 Maret 2022

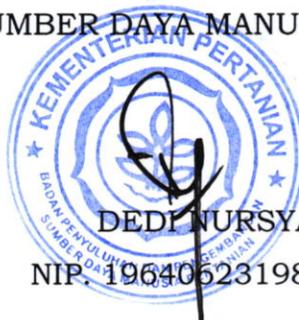
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- I. Pengarah : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pertanian
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pertanian
- III. Pelaksana :
- A. Ketua : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
- B. Sekretaris : Subkoordinator Pelaporan dan Tindak Lanjut  
Hasil Pengawasan
- C. Anggota :
1. Sekretariat : 1. Kepala Bagian Umum;  
2. Koordinator Perencanaan;  
3. Koordinator Keuangan;  
4. Koordinator Hukum, Organisasi dan  
Kepegawaian;  
5. Subkoordinator Program;  
6. Subkoordinator Data dan Evaluasi;  
7. Subkoordinator Hukum dan Organisasi;  
8. Subkoordinator Akuntansi dan Verifikasi;  
9. Romi Rumawan;  
10. Risnawati;  
11. Yovva Nofrizal;  
12. Fudy Anisa;  
13. Muchamad Sopian.
2. Pusat Penyuluhan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Evaluasi Penyuluhan;  
2. Subkoordinator Program dan Kerjasama  
Penyuluhan;  
3. Subkoordinator Evaluasi Penyuluhan;  
4. Ery Rivani.
3. Pusat Pelatihan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Kerjasama Pelatihan;  
2. Subkoordinator Program Pelatihan;

3. Andi Suswinarto;
  4. Muh'lis.
4. Pusat Pendidikan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Kerjasama Pendidikan;
2. Subkoordinator Program dan Evaluasi Pendidikan;
  3. Marianiwati;
  4. Dori Mega Mahendra.
- IV. Pelaksana UPT :
1. Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi : 1. Sri Wahyu Sahita;
  2. Tita Rosita.
  2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara : 1. Muhammad Bayu Aji;
  2. Agus Sulaeman.
  3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang : 1. Yanissa Nuraeni Kuswandi;
  2. Teten Cahya Mulyana.
  4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan : 1. Djoko Witono;
  2. Rafi Fitrianto.
  5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu : Ninda Tika Sari
  6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang : Ha Sudoni
  7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku : Heppy Love Rida Sinaga
  8. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang : 1. Dewi Yohana Manu;
  2. Adrianus Antoin Romea.
  9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung : 1. Johan Wahyudi;
  2. Sri Purwaningsih.
  10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi : Henri Yanti
  11. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor : 1. Hilmiyati Kartika Candra;
  2. Nurbuda Prahasdita Yudwiyana.

12. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Yoma  
(Kampus Jogja) : 1. Hari Sudharto;  
2. Novitha Tri R Dewi.
13. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Yoma  
(Kampus  
Magelang) : 1. Akimi;  
2. Winda Salwati.
14. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian  
Malang : Yudha Onny Oktarina
15. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Gowa : 1. Faisal Tajuddin;  
2. Suhartini IS.
16. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Medan : 1. Dhani Handoko;  
2. Amto Dohar Budi Sakti.
17. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian  
Manokwari : 1. Yovita R. Irianingrum;  
2. Masriani.
18. SMK-PP Negeri  
Sembawa : 1. Supriyanto;  
2. Evi Megawati.
19. SMK-PP Negeri  
Kupang : 1. Sitti Kamalia Kamal;  
2. Noni N, Neno.
20. SMK-PP Negeri  
Banjarbaru : 1. Rasyidi;  
2. Johan Pujianto.
21. Politeknik  
Enjiniring  
Pertanian  
Indonesia (PEPI) : Dedi Laksmana

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI  
NIP. 196406231989031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 104/Kpts/PW.160/I/03/2022  
TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu melaksanakan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/ 10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

- a. menyiapkan dan menyusun TOR/Proposal sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

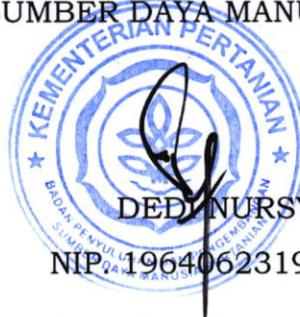
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Maret 2022

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 104/Kpts/PW.160/I/03/2022  
TANGGAL : 07 Maret 2022

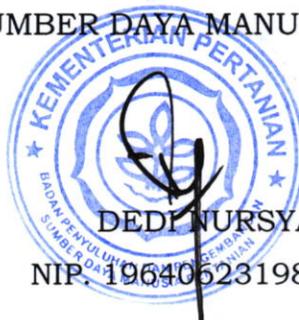
PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN  
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- I. Pengarah : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pertanian
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pertanian
- III. Pelaksana :
- A. Ketua : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
- B. Sekretaris : Subkoordinator Pelaporan dan Tindak Lanjut  
Hasil Pengawasan
- C. Anggota :
1. Sekretariat : 1. Kepala Bagian Umum;  
2. Koordinator Perencanaan;  
3. Koordinator Keuangan;  
4. Koordinator Hukum, Organisasi dan  
Kepegawaian;  
5. Subkoordinator Program;  
6. Subkoordinator Data dan Evaluasi;  
7. Subkoordinator Hukum dan Organisasi;  
8. Subkoordinator Akuntansi dan Verifikasi;  
9. Romi Rumawan;  
10. Risnawati;  
11. Yovva Nofrizal;  
12. Fudy Anisa;  
13. Muchamad Sopian.
2. Pusat Penyuluhan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Evaluasi Penyuluhan;  
2. Subkoordinator Program dan Kerjasama  
Penyuluhan;  
3. Subkoordinator Evaluasi Penyuluhan;  
4. Ery Rivani.
3. Pusat Pelatihan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Kerjasama Pelatihan;  
2. Subkoordinator Program Pelatihan;

3. Andi Suswinarto;
  4. Muh'lis.
4. Pusat Pendidikan Pertanian : 1. Koordinator Program dan Kerjasama Pendidikan;
2. Subkoordinator Program dan Evaluasi Pendidikan;
  3. Marianiwati;
  4. Dori Mega Mahendra.
- IV. Pelaksana UPT :
1. Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi : 1. Sri Wahyu Sahita;
  2. Tita Rosita.
  2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara : 1. Muhammad Bayu Aji;
  2. Agus Sulaeman.
  3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang : 1. Yanissa Nuraeni Kuswandi;
  2. Teten Cahya Mulyana.
  4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan : 1. Djoko Witono;
  2. Rafi Fitrianto.
  5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu : Ninda Tika Sari
  6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang : Ha Sudoni
  7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku : Heppy Love Rida Sinaga
  8. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang : 1. Dewi Yohana Manu;
  2. Adrianus Antoin Romea.
  9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung : 1. Johan Wahyudi;
  2. Sri Purwaningsih.
  10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi : Henri Yanti
  11. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor : 1. Hilmiyati Kartika Candra;
  2. Nurbuda Prahasdita Yudwiyana.

12. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Yoma  
(Kampus Jogja) : 1. Hari Sudharto;  
2. Novitha Tri R Dewi.
13. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Yoma  
(Kampus  
Magelang) : 1. Akimi;  
2. Winda Salwati.
14. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian  
Malang : Yudha Onny Oktarina
15. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Gowa : 1. Faisal Tajuddin;  
2. Suhartini IS.
16. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian Medan : 1. Dhani Handoko;  
2. Amto Dohar Budi Sakti.
17. Politeknik  
Pembangunan  
Pertanian  
Manokwari : 1. Yovita R. Irianingrum;  
2. Masriani.
18. SMK-PP Negeri  
Sembawa : 1. Supriyanto;  
2. Evi Megawati.
19. SMK-PP Negeri  
Kupang : 1. Sitti Kamalia Kamal;  
2. Noni N, Neno.
20. SMK-PP Negeri  
Banjarbaru : 1. Rasyidi;  
2. Johan Pujianto.
21. Politeknik  
Enjiniring  
Pertanian  
Indonesia (PEPI) : Dedi Laksmana

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 196406231989031002

**PERSENTASE PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
PADA KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA DEKONSENTRASI  
TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
1	ACEH	BENER MERIAH	REDELONG	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) atau varitas lokal 3. Penggunaan pupuk organik
2	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA	KUALUH SELATAN	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo (4:1) 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang dan refugia
3	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo (2:1) 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk berimbang
4	RIAU	INDRA GIRI HILIR, ROKAN HILIR	BANGKO, SUNGAI-SUNGAI PIRING	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo (2:1) 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4. Pengolahan tanah
5	JAMBI	TEBING TINGGI	BATANG ASAM	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang
6	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN, LAHAT, OKU SELATAN, OKU TIMUR	TANJUNG LAGO, GUMAY TALANG, GUNUNG TERANG, BELITANG III	2	1,600	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 5. Teknologi jarak tanam dan olah tanah
7	BENGKULU				-		
8	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN, PRINGSEWU	SIDOMULYO, PAGELARAN	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk berimbang
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	RIAS	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) atau varitas lokal 3. Penggunaan pupuk organik
10	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	KUNDUR	2	400	CABAI	1. Teknologi produksi lipat ganda (Proliga) 2. Penggunaan varietas unggul 3. Pengelolaan hara air tanah 4. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
11	DKI JAKARTA						
12	JAWA BARAT	MAJALENGKA, CIAMIS	SINDANGWANGI, LUMBUNG	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penggunaan POC Nutrilivit 5. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
13	JAWA TENGAH	TEGAL, PEKALONGAN	LEBAKSIU, KEDUNGWUNI	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) atau varitas lokal 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk berimbang

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
14	DI YOGYAKARTA	SLEMAN	UPTD BP4 WIYAH III SAYENGAN	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Aplikasi agensi hayati 5. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
15	JAWA TIMUR				-		
16	BANTEN	PANDEGLANG, LEBAK	BOJONG, RANGKAS LEBAK	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo ( 2. Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari 32 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penanaman bibit muda 5. Seleksi benih dengan telur 6. Mekanisasi alat pertanian
17	BALI	JEMBRANA	NEGARA	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Sistem Pengairan berselang (Intermittent Irrigation) 3. Biourine (pupuk cair bahan dasarnya dari urine sapi) 4. Pestisida Nabati
18	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA, LOMBOK UTARA	RABA, TANJUNG	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 5. Mekanisasi alat pertanian
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO, FLORES TIMUR	HOLOAMA, KONGA	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 5. Alat dan mesin pertanian
20	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	SELAKAU	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang
21	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	TEWAH SELATAN	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Pengendalian hama tikus 6. Semai yang baik dan sehat
22	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) dan varietas hibrida 3. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
23	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASIR UTARA	BABULU DARAT	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4. Mekanisasi alat pertanian
24	KALIMANTAN UTARA				-		
25	SULAWESI UTARA	MINAHASA, BOLAANG MONGONDOW	PASSI TIMUR, K Aidipang	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penggunaan pupuk hayati 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
26	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	SIWELY	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4. Pengolahan tanah
27	SULAWESI SELATAN	ENREKANG, WAJO, SINJAI, GOWA	ENREKANG, TANCUNG, SINJAI BARAT, KANREAPIA	2	1,600	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengaturan populasi/jarak tanam 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 5. Mekanisasi alat pertanian
28	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR, MUNA BARAT	TINONDO, SAWERIGADI	2	800	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengaturan populasi/jarak tanam 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
29	GORONTALO	BONE BOLANGO	KABILA	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
30	SULAWESI BARAT	POLAWALI MANDAR	TINAMBUNG	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4. Penggunaan alat dan mesin pertanian
31	MALUKU	BURU	WAEALATA	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 5. Penanganan pasca panen
32	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	IBU	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Pengolahan tanah 5. Pengaturan jarak tanam
33	PAPUA BARAT				-		
34	PAPUA	JAYAPURA	NIMBOKRANG	2	400	PADI	1. Sistem jajar legowo 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Penggunaan pupuk berimbang 4. Pengaturan jarak tanam
<b>TOTAL</b>			-	<b>58</b>	<b>17,600</b>		

**DATA JUMLAH PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
PADA KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN YANG BERSUMBER DARI PHLN SIMURP  
TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
1	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	1 JAHARUN	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	2 PANTAI LABU	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	3 BERINGIN	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	4 TANJUNG GARBUS	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	5 TANJUNG BERINGIN	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	6 SEI REJO	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	7 PEMATANG SIJONAM	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	8 SERBA JADI	3	720	PADI	PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>5,760</b>		

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
2	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	1 KARANG AGUNG ILIR	3	720	PADI	Penggunaan bibit unggul, penggunaan pestisida nabati, penggunaan pupuk organik, sistem tanam jajar legowo, pengendalian hama tikus dengan membuat rumah burung burung hantu (RUBUHA)
	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN	2 LALAN	3	720	PADI	Penggunaan bibit unggul, penggunaan pestisida nabati, penggunaan pupuk organik, sistem tanam jajar legowo, pembuatan caplak untuk tanam jajar legowo, pengendalian hama tikus dengan membuat rumah burung burung hantu (RUBUHA)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,440</b>		
3	JAWA BARAT	CIREBON	1 WALED	3	720	PADI	Benih Bermutu dengan perlakuan benih; Varietas Unggul; Penggunaan Alsintan dan Pupuk Organik; Sistem Legowo; Pemupukan Berimbang dengan Penggunaan PUTS dan BWD; Pengukuran GRK; Pengairan Berselang dan Penggunaan AWD; Penggunaan Pestisida Nabati; Penggunaan Alsintan
	JAWA BARAT	CIREBON	2 GEBANG	3	720	PADI	Benih Bermutu dengan perlakuan benih; Varietas Unggul; Penggunaan Alsintan dan Pupuk Organik; Sistem Legowo; Pemupukan Berimbang dengan Penggunaan PUTS dan BWD; Pengukuran GRK; Pengairan Berselang dan Penggunaan AWD; Penggunaan Pestisida Nabati; Penggunaan Alsintan
	JAWA BARAT	CIREBON	3 PABEDILAN	3	720	PADI	Benih Bermutu dengan perlakuan benih; Varietas Unggul; Penggunaan Alsintan, Pupuk Organik dan Kapur Pertanian; Sistem Legowo; Pemupukan Berimbang dengan Penggunaan PUTS dan BWD; Pengukuran GRK; Pengairan Berselang dan Penggunaan AWD; Penggunaan Pestisida Nabati; Penggunaan Alsintan
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	4 GANTAR	3	720	PADI	Pembuatan Bokhasi; Pembuatan Pestisida nabati; Pembuatan Agen hayati; Penerapan Sistem pengairan bawah kering; penggunaan BWD, sistem tanam jajar legowo
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	5 KANDANGHAUR	3	720	PADI	Pembuatan Bokhasi; Pembuatan Pestisida nabati; Pembuatan Agen hayati; Penerapan Sistem pengairan bawah kering; penggunaan BWD, sistem tanam jajar legowo
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	6 HAURGEULIS	3	720	PADI	Pembuatan pupuk organik; Pembuatan pestisida nabati; Perbanyak bakteri paeni bacillus; AWD; BWD; Pengukuran GRK
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	7 ANJATAN	3	720	PADI	Pembuatan pupuk organik (kotoran hewan, Sekam & EM4); Pembuatan Pestisida nabati (Bawang Putih & Deterjen); Perbanyak paeni bacillus polymyxa; Penerapan AWD; Pengukuran dg BWD; Pengukuran emisi GRK

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	8 KROYA	3	720	PADI	Pembuatan Pupuk organik (kohe); Pembuatan paeni bacillus; Pengukuran GRK
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	9 GABUSWETAN	3	720	PADI	Pembuatan pupuk organik; Pembuatan pestisida nabati; Perbanyak bakteri paeni bacillus; AWD; BWD; Pengukuran GRK
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	10 PATROL	3	720	PADI	Pupuk organik padat dan cair; Praktek pembuatan dan aplikasi paini Casillas; Bumbung pengendali penggerek batang; Pengukuran GRK; AWD; BWD
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	11 SUKRA	3	720	PADI	Benih infari 32; Seleksi benih; Pupuk Organik ( Kohe ); Jarak Tanam Legowo 2:1 ,4:1 dan 5:1; AWD;BWD ; Pengukuran GRK; Pesnab; Paeni basilus
	JAWA BARAT	INDRAMAYU	12 BONGAS	3	720	PADI	Pembuatan pupuk organik (kohe); Pembuatan pestisida nabati (bawang putih); Perbanyak bakteri paeni bacillus; AWD; Pengukuran GRK; BWD
	JAWA BARAT	KARAWANG	13 UPTD PERTANIAN PEDES	3	720	PADI	benih unggul Inpari 32; seleksi benih dengan larutan garam dan telur; tanam jarak legowo 5:1; pupuk organik padat kohe kambing); pesnab bahan baku daun Johar ,Bintaro, kunyit,laja dan bawang putih; agen hayati (paenybacillus); Pemupukan berimbang dengan BWD; pengairan intermiten dengan instalasi AWD; panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	KARAWANG	14 UPTD CIKAMPEK	3	720	PADI	Benih unggul Inpari 32; Seleksi benih bernas dengan media larutan garam dan telur; Jajar legowo 4:1; Pupuk Organik granul dan mol (keong mas); Pestisida Nabati (bahan baku singkong dan air kelapa); Agen hayati (Paenybacillus); Pemupukan berimbang dengan BWD dan PUTS; Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD; Panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	KARAWANG	15 UPTD JATISARI	3	720	PADI	Pemupukan berimbang dengan mengurangi pupuk kimia; Penggunaan pupuk organik (granule dan kompos) dan dolomit untuk memperbaiki struktur tanah dan menetralkan ph tanah; Penggunaan benih varietas unggul baru adaptif lingkungan (inpari 32); Melakukan seleksi benih agar benih yang di semai bernas; Pengendalian hama terpadu (preentif : pengendalian menggunakan pesnab, pengamatan rutin dan pengambilan keputusan pengendalian pestisida berdasarkan pengamatan, kuratif : pengendalian pestisida secara bijaksana agar tidak membunuh musuh alami; Pengairan : pengairan basah kering (PBK) berdasarkan pipa pengamatan PBK (menggunakan AWD); Mekanisasi panen dan pasca panen menggunakan combine harvester untuk mengurangi losis

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	KARAWANG	16 UPTD KARAWANG BARAT	3	720	PADI	Benih unggul Inpari 32, Seleksi benih bernas dengan media air garam dan telur, Jajar legowo 2:1, Pupuk Organik padat dan cair, Pestisida Nabati, Pemupukan berimbang dengan BWD, Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD, Panen dengan power thresher, Penggunaan PH tanah
	JAWA BARAT	KARAWANG	17 UPTD KOTABARU	3	720	PADI	Pengolahan tanah dengan menggunakan traktor dan penambahan kapur dolomit untuk memperbaiki pH tanah dan pupuk organik padat (Kompos Jerami), Penggunaan benih varietas unggul baru adaptif Spesifik Lokasi (inpari 32) dan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam agar didapatkan kualitas benih yang bernas dan sehat, Penanaman dengan umur bibit muda (18-20 hss) dan jumlah bibit 2-3 per rumpun dengan sistem jarwo 2:1 dan 4:1, Pengairan dengan sistem (PBK) pengairan basah kering berdasarkan pipa pengamatan AWD, Pemupukan secara berimbang dengan Penggunaan Soil Test Kit dan BWD, Penambahan pupuk organik padat (Kompos Jerami) dan POC (Bonggol Pisang, Pengendalian hama terpadu secara preventif dengan seed treatment dan pengamatan berkala, pengendalian dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati dan Paenybacillus Polymixa, Mekanisasi panen dan pasca panen dengan menggunakan Power Thresher.
	JAWA BARAT	KARAWANG	18 PAKISJAYA	3	720	PADI	Seleksi benih sederhana; Penggunaan benih unggul inpari 32; Jarwo 4:1; POG; POC; Pesnab; Penggunaan paeny bacillus; AWD; Pemupukan berimbang/BWD; Panen dg sabit & power threaser
	JAWA BARAT	KARAWANG	19 UPTD RENGASDENGLOK	3	720	PADI	Benih unggul bermutu dan berlabel varietas inpari 32; Seleksi benih; Jajar legowo 4:1; MOL keong mas, Pupuk Organik padat dan cair; Pestisida Nabati; Pemupukan berimbang dengan puts dan BWD; Pengairan intermi; Panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	KARAWANG	20 UPTD TELUKJAMBE BARAT	3	720	PADI	Benih unggul Inpari 32, Seleksi benih bernas dengan media air garam dan telur, Jajar legowo 4:1; Pupuk Organik padat dan cair; Pestisida Nabati; Agen hayati (Paenybacillus) ; Pemupukan berimbang dengan BWD; Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD; Panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	KARAWANG	21 KUTAWALUYA	3	720	PADI	Varietas benih unggul Inpari 32; Seleksi benih bernas dengan media air,garam dan telur; Tanam Jajar legowo 4:1; Penggunaan Pupuk kompos dan MOL; Penggunaan pestisida Nabati; Penggunaan Agen hayati (Paenybacillus); Pemupukan berimbang dengan BWD; Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD; Panen dengan power thresher

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	KARAWANG	22 BATU JAYA	3	720	PADI	Benih unggul Inpari 32; Seleksi benih bernas dengan media air garam dan telur; Jajar legowo 4:1; Pupuk Organik padat dan cair; Pestisida Nabati; Pemupukan berimbang dengan BWD; Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD; Panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	KARAWANG	23 CIAMPEL	3	720	PADI	Varietas Baroma; Seleksi benih bernas dengan media air,garam dan telur; Tanam Jajar legowo 2:1; Penggunaan Pupuk kompos dan MOL; Penggunaan pestisida Nabati; Penggunaan Agen hayati (Paenibacillus) ; Pengairan dengan pengamatan Basah Kering PBK dgn alat AWD; Panen dengan power thresher
	JAWA BARAT	SUBANG	24 BLANAKAN	3	720	PADI	Pemupukan berimbang sesuai kandungan unsur hara tanah melalui uji tanah dengan PUTS dan BWD; Pengolahan tanah 2 kali dengan menggunakan traktor; Penggunaan benih unggul inpari 32; Seleksi benih berdasarkan berat jenis dengan larutan garam; Pengairan berselang dengan menggunakan alat indikator AWD; Penggunaan pupuk organik dengan bahan jerami dan kotoran kambing; Pemakaian ZPT dengan ekstrak bawang merah; Perbanyakan dan pengaplikasian agen hayati Paenibacillus Phylomyxa dengan EKG; Pembuatan dan pengaplikasian pestisida nabati dari ekstrak bawang putih untuk pencegahan dan pengendalian OPT; Sistem tanam jajar legowo 4 : 1 dengan benih muda 15-20 HSS; Panen menggunakan power thresher dan combine harvester
	JAWA BARAT	SUBANG	25 CIPUNAGARA	3	720	PADI	Uji Tanah sawah dengan PUTS; Pengolahan tanah Sempurna 1 dan 2; Pembuatan pupuk organik/bokashi (kohe dan jerami); Aplikasi Pupuk Organik pada lahan demplot saat pengolahan tanah; Seleksi benih bernas dengan menggunakan Larutan Garam dan indikator telur; Persemaian kering; Penggunaan benih unggul bertelur (putih); Benih potensi hasil tinggi : var. Inpari 32; Jarak Tanam :4:1; umur bibit 15 sd 20 HSS; Rekomendasi Pemupukan berimbang : pH, pupuk P dan K dengan PUTS Pupuk N dengan alat Bagan Warna Daun (BWD); Penerapan PHT; Pembuatan dan aplikasi Pestisida Nabati (bahan : Bakau dan Kunyit; Pengelolaan air irigasi dengan menggunakan alat Alternate Wet and Dry (AWD) dan sistem intermitten; Panen dengan meminimalisir losses (kehilangan hasil saat panen); Ubinan : mengetahui provitas demplot dan kontrol; Panen menggunakan alat terpal dan power tresher; Penanganan pasca panen yg baik

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	SUBANG	26 CIASEM	3	720	PADI	Uji Tanah dengan PUTS; Pengolahan tanah 1 dan 2; Menggunakan Pupuk Organik saat pengolahan tanah; Seleksi benih dengan menggunakan Larutan Garam; Persemaian menggunakan waring; Benih unggul Inpari 32; Jarak Tanam Legowo 2:1 dan 4:1 dengan umur bibit 17 HSS; Pemupukan memakai bantuan alat BWD; PHT dengan melihat situasi di lahan menggunakan Pesnab dan Bacteri Paeni; Pengelolaan air dengan menggunakan alat AWD; Panen dengan Power Thresher
	JAWA BARAT	SUBANG	27 PUSAKAJAYA	3	720	PADI	Uji PUTS untuk mengetahui kandungan hara tanah dan rekomendasi pemupukan; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik Padat dan Cair; pengolahan tanah; Menggunakan benih Inpari 32; Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 4:1; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Pengambilan sample GRK umur tanaman 30 HST, 60 HST, 90 HST; Panen menggunakan alat power thresher
	JAWA BARAT	SUBANG	28 BINONG	3	720	PADI	Penggunaan alat uji PUTS sbg pengukur kadar hara dalam tanah; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik dari campuran kotoran hewan; Pengolahan tanah scr optimal (sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor); Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur; Sistem Jarak Tanam jajar legowo m 4:1; Penggunaan Pestisida Nabati dengan bawang putih & Tembakau untuk pengendalian OPT pada padi; Perbanyak agen hayati paenibacillus sebagai agen pengendali hayati OPT/penyakit padi.; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Panen dg power thresher
	JAWA BARAT	SUBANG	29 CIKAUM	3	720	PADI	Penggunaan PUTS untuk mengukur kadar hara dalam tanah; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik dari campuran jerami dan kotoran hewan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan melakukan pengolahan tanah sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor; Benih unggul Inpari 32; Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur.; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 4:1 dan 5:1; Penggunaan Pestisida Nabati menggunakan bawang putih untuk pengendalian OPT pada padi; Perbanyak agen hayati paenibacillus sebagai agen pengendali hayati OPT/penyakit padi.; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Panen menggunakan alat power thresher

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	SUBANG	30 COMPRENG	3	720	PADI	Penggunaan alat uji PUTS sbg pengukur kadar hara dalam tanah; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik dari campuran jerami dan kotoran hewan untuk meningkatkan kesuburan tanah; Pengolahan tanah scr optimal (sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor); Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 2:1, 3:1 dan 4:1; Teknologi tanam dengan Transplanter; Penggunaan Pestisida Nabati dengan bawang putih untuk pengendalian OPT pada padi; Perbanyak agen hayati paenibacillus sebagai agen pengendali hayati OPT/penyakit padi; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Pengukurann gas emisi rumah kaca; Panen dg power thresher untuk mengurangi/menghilangkan losses
	JAWA BARAT	SUBANG	31 LEGONKULON	3	720	PADI	Varietas inpari 32; Seleksi benih bernas dengan media air,garam dan telur; Uji Tanah Menggunakan PUTS (perangkat uji tanah sawah); Tanam Jajar legowo 4:1; Penggunaan Pupuk kompos dan MOL; Penggunaan pestisida Nabati (Jika diperlukan) , Pengendalian hama dengan prinsip PHT; Pengairan dengan melakukan pengamatan, sistem bursat/ Basah Kering PBK dgn alat AWD; Pengukuran gas emisi rumah kaca.; Panen dengan power threser
	JAWA BARAT	SUBANG	32 PAGADEN BARAT	3	720	PADI	Penggunaan PUTS untuk mengukur kadar hara dalam tanah; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik dari campuran jerami; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik cair dari pelepah pisang, bahan organik sampah dapur,sabut kelapa, kotoran hewan; Pengolahan tanah 1 dan 2; Benih unggul Inpari 32; Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur.; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 4:1 dan 6:1; Penggunaan Pestisida Nabati campuran kunyit, bawang putih, sereh dan daun mindi untuk pengendalian OPT pada padi; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Pengambilan sampel uji emisi Gas Rumah Kaca; Panen menggunakan power threser

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	SUBANG	33 PAGADEN	3	720	PADI	Uji Tanah sawah dengan PUTS; Pengolahan tanah Sempurna 1 dan 2; Pembuatan pupuk organik/bokashi (kohe dan jerami); Aplikasi Pupuk Organik pada lahan demplot saat pengolahan tanah; Seleksi benih bernas dengan menggunakan Larutan Garam dan indikator telur; Persemaian kering; Penggunaan benih unggul berlabel (putih); Benih potensi hasil tinggi : var. Inpari 32; Jarak Tanam : Jarwo 2:1 dan 4:1; umur bibit 15 sd 20 HSS; Rekomendasi Pemupukan berimbang : pH, pupuk P dan K dengan PUTS Pupuk N dengan alat Bagan Warna Daun (BWD); Penerapan PHT; Pembuatan dan aplikasi Pestisida Nabati (bahan : daun sirsak, daun mindi, Sereh, jaringao, kunyit); Pembuatan dan aplikasi Mikroorganisme Lokal (MOL) berbahan bonggol pisang dan berenuk; Perbanyak dan aplikasi agensi hayati Bacteri Paenibacillus polymixa; Pengelolaan air irigasi dengan menggunakan alat Alternate Wet and Dry (AWD) dan sistem intermitten; Panen dengan meminimalisir losses (kehilangan hasil saat panen); Ubinan : mengetahui provitas demplot dan kontrol; Panen menggunakan alat terpal dan power tresher; Penanganan pasca panen yg baik
	JAWA BARAT	SUBANG	34 PAMANUKAN	3	720	PADI	Pengukuran Kondisi Tanah (Unsur Hara) dengan Menggunakan PUTS; Merakit Alat pembuatan POC, diisi dengan bahan sampah rumah tangga dan EM4, Hasil POC diaplikasikan dengan cara menyiramkan ke lahan saat pengolahan lahan, kemudian sebelum pemupukan pertama, dan sebelum pemupukan kedua; Melakukan pengukuran emisi Gas Rumah Kaca pada saat 30 hst, 61 Hst dan 90 Hst; Melakukan seleksi benih menggunakan larutan garam dan telur; Perbanyak Agensi Hayati Paeny Bacillus Polymyxa; Pembuatan Pestisida Nabati untuk WBC dan Jamur berbahan dasar bawang putih, daun Mindri, kunyit dan buah berenuk; Jajar Legowo 4:1 dan masih ada yang memakai legowo 5; Penggunaan Bagan Warna Daun; Penggunaan AWD; Panen dengan menggunakan Combine Harvester dan Power Thresher untuk sawah yang dalam
	JAWA BARAT	SUBANG	35 PUSAKANAGARA	3	720	PADI	Uji PUTS untuk mengetahui kandungan hara tanah dan rekomendasi pemupukan; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik Padat dan Cair; pengolahan tanah sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor; Menggunakan benih Varietas Unggul Baru; Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur.; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 4:1 ; Penggunaan Pestisida Nabati untuk pengendalian hama pada padi; Perbanyak dan aplikasi agensi hayati Paenibacillus polymyxa sebagai agen pengendalian penyakit pada padi; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Panen menggunakan alat power thresher

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA BARAT	SUBANG	36 SUKASARI	3	720	PADI	Penggunaan alat uji PUTS sbg pengukur kadar hara dalam tanah; Pembuatan dan aplikasi pupuk organik dari campuran kotoran hewan; Pengolahan tanah scr optimal (sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor); Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur; Sistem Jarak Tanam jajar legowo m 4:1; Perbanyak agen hayati paenibacillus sebagai agen pengendali hayati OPT/penyakit padi.; Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD); Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Panen dg power thresher
	JAWA BARAT	SUBANG	37 TAMBAKDAHAN	3	720	PADI	Penggunaan PUTS untuk mengukur kadar hara dalam tanah; Pemberian pupuk organik dari campuran jerami dan kotoran hewan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan melakukan pengolahan tanah sebanyak 2 kali dengan menggunakan traktor; Melakukan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dan telur; Sistem Jarak Tanam jajar legowo 4:1 dan 5:1; Penggunaan Pestisida Nabati campuran kunyit, bawang putih, sereh dan daun pepaya untuk pengendalian OPT pada padi; Perbanyak agensia hayati paenibacillus sebagai agen pengendali hayati OPT/penyakit padi.; Penggunaan Bagan Warna Daun; Penggunaan AWD dalam pengelolaan air; Panen menggunakan combine harvester dan power thresher
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>111</b>	<b>26,640</b>		

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
4	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	1 RAKIT	3	720	PADI	Penggunaan Bibit unggul; Seleksi benih; Penggunaan pupuk organik; Tanam jajar legowo; Pemupukan berimbang; Pengairan berselang (AWD); Pengendalian hama terpadu; Panen dg thresher (tdk semua klmpk); Pengukuran GRK (poktan Tunas Harapan); Penggunaan PUTS
	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	2 WANADADI	3	720	PADI	Penggunaan Bibit unggul; Seleksi benih; Penggunaan pupuk organik; Tanam jajar legowo; Pemupukan berimbang; Pengairan berselang (AWD); Pengendalian hama terpadu; Panen dg thresher (tdk semua klmpk); Pengukuran GRK (poktan Tunas Harapan); Penggunaan PUTS
	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	3 BUKATEJA	3	720	PADI	Penggunaan VUB; AWD; Kalender tanam; Jarwo 2 : 1; Pupuk organik p dan c; Pestisida org/nab; PUTS; PHT; Pupuk Berimbang; Bagan Warna Daun
	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	4 KEMANGKON	3	720	PADI	Penggunaan VUB; AWD; Kalender tanam; Jarwo 2 : 1; Pupuk organik p dan c; Pestisida org/nab; PUTS; PHT; Pupuk Berimbang; Bagan Warna Daun
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	5 BANYUURIP	3	720	PADI	Pemilihan benih unggul adaktif; Seleksi benih; Tanam bibit muda; Tanam jajar legowo; Penggunaan PO padat; Penggunaan POC; Pemupukan berimbang; AWD; Penggunaan APH; Penanganan panen dg thresher; Pengukuran GRK; Pesnab; Penggunaan BWD; Penggunaan PUTS
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	6 BAYAN	3	720	PADI	Pemilihan benih unggul adaktif; Seleksi benih; Tanam bibit muda; Tanam jajar legowo; Penggunaan PO padat; Penggunaan POC; Pemupukan berimbang; AWD; Penggunaan APH; Penanganan panen dg thresher; Pengukuran GRK; Pesnab; Penggunaan BWD; Penggunaan PUTS
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	7 GEBANG	3	720	PADI	Pemilihan benih unggul adaktif; Seleksi benih; Tanam bibit muda; Tanam jajar legowo; Penggunaan PO padat; Penggunaan POC; Pemupukan berimbang; AWD; Penggunaan APH; Penanganan panen dg thresher; Pengukuran GRK; Pesnab; Penggunaan BWD; Penggunaan PUTS
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	8 PURWOREJO	3	720	PADI	Pemilihan benih unggul adaktif; Seleksi benih; Tanam bibit muda; Tanam jajar legowo; Penggunaan PO padat; Penggunaan POC; Pemupukan berimbang; AWD; Penggunaan APH; Penanganan panen dg thresher; Pengukuran GRK; Pesnab; Penggunaan BWD; Penggunaan PUTS

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	9 LOANA			PADI	Penggunaan bibit cekaman iklim, Tanam bibit muda dengan Jajar legowo, Teknik pembuatan PO, Teknologi hemat air melalui AWD, Pemupukan Berimbang, TeKnologi pembuatan pesnab, Teknologi pembuatan MOL, Demcara seleksi benih, Derdal OPT, Teknik ubinan
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	10 NGOMBOL			PADI	Penggunaan bibit cekaman iklim, Teknologi seleksi benih, Tanam bibit muda, Jajar legowo, Pemupukan berimbang berdasar PUTS, Pembuatan PO, Teknologi pembuatan MOL, Tehnologi pembuatan Pestisida nabati, Teknologi hemat air dengan AWD, Teknologi ubinan
	JAWA TENGAH	PURWOREJO	11 PUWODADI			PADI	Tanam bibit muda dengan Jajar legowo, Seleksi benih, Pemupukan berimbang dengan PUTS, Teknologi pembuatan PO, Teknologi pembuatan MOL, Teknologi hemat air dengan penggunaan AWD, Teknik ubinan
	JAWA TENGAH	BREBES	12 BANJARHARJO	3	720	PADI	AWD, Varietas Unggul, Pupuk Berimbang, Pupuk Organik, Pupuk Kimia, Jarwo, Pestisida Nabati, Pestisida Kimia, Kalender Tanam
	JAWA TENGAH	BREBES	13 TANJUNG	3	720	PADI	AWD, Varietas Unggul, Pupuk Berimbang, Pupuk Organik, Pupuk Kimia, Jarwo, Pestisida Nabati, Pestisida Kimia, Kalender Tanam
	JAWA TENGAH	BREBES	14 LOSARI	3	720	PADI	AWD, Varietas Unggul, Pupuk Berimbang, Pupuk Organik, Pupuk Kimia, Jarwo, Pestisida Nabati, Pestisida Kimia, Kalender Tanam
	JAWA TENGAH	GROBONGAN	15 GUBUNG	3	720	PADI	Penggunaan Benih Unggul, Pemupukan Berimbang Penggunaan Bahan Organik, Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
	JAWA TENGAH	GROBONGAN	16 KARANG RAYUNG	3	720	PADI	Penggunaan Benih Unggul, Pemupukan Berimbang Penggunaan Bahan Organik, Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
	JAWA TENGAH	GROBONGAN	17 GODONG	3	720	PADI	Penggunaan Benih Unggul, Pemupukan Berimbang Penggunaan Bahan Organik, Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
	JAWA TENGAH	DEMAK	18 BONANG	3	720	PADI	Penggunaan bibit unggul, Sistem tanam jajar legowo, Pemupukan berimbang (PUTS), Penggunaan bahan organik (pupuk organik, mol, nitrobakter, pestisida nabati)

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA TENGAH	DEMAK	19 DEMAK	3	720	PADI	Pemupukan berimbang, Pembuatan dan pengaplikasian MOL dan Pemakaian benih varietas unggul
	JAWA TENGAH	DEMAK	20 KEBONAGUNG	3	720	PADI	Pemupukan berimbang, Pembuatan dan pengaplikasian MOL, Jajar legowo, Pengairan berselang, Pemakaian benih varietas unggul
	JAWA TENGAH	DEMAK	21 DEMPET	3	720	PADI	Penggunaan PUTS, Pengembangan Nitrobakter, pupuk organik, MOL, Penggunaan Varietas Unggul Adaptif, Irigasi berselang
	JAWA TENGAH	DEMAK	22 WONOSALAM	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul cekaman iklim, Pemupukan berimbang, Pembuatan dan pengaplikasian MOL
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	23 ALIAN	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul, perlakuan benih menggunakan larutan garam, penggunaan pupuk organik dan perbanyakan nitrobacter, tanam sistem jajar legowo, pengairan basah kering (AWD), pemupukan berimbang berdasarkan PUTS
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	24 BULUSPESANTREN	3	720	PADI	Penggunaan Varietas unggul ,tanam jajar legowo,penggunaan pupuk organik,Pembuatan MOL,Pestisida nabati dengan menggunakan ember tumpuk,PUTS,pengairan basah,kering (AWD)
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	25 KARANGSAMBUNG	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul, perlakuan benih, penggunaan pupuk organik, tanam sistem jajar legowo, pengairan basah kering,
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	26 KEBUMEN	3	720	PADI	Penggunaan bibit unggul/varietas unggul baru (VUB), Penggunaan pupuk organik padat dan cair, Perlakuan benih, Penerapan sistem tanam jajar legowo, Pengendalian hama terpadu, Pengaplikasian AWD
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	27 KLIRONG	3	720	PADI	Penggunaan PUTS, Pemilihan Varietas, Perambangan Menggunakan Air Garam, Tanam Sistem Jajar Legowo 2:1 Penggunaan Pupuk Organik, Pembuatan Pupuk Organik, MOL, Pesnab, Perbanyakan Nitrobakter, Aplikasi AWD, Penerapan pengendalian OPT
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	28 KUTOWINANGUN	3	720	PADI	Sistem Tanam Jarwo 2:1., Penggunaan varietas padi unggul rendah Emisi, Pengairan AWD d.)Pemupukan berimbang dan PUTS, Penggunaan Kalender Tanam (KATAM), Pengendalian OPT Terpadu, Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik Padat, Perbanyakan dan Aplikasi Nitobacter, Pembuatan MOL, POC, dan Pesnab menggunakan Ember Tumpuk, Aplikasi Pestisida Hayati, Dekomposer, Kapur Pertanian,dan Asam Humat
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	29 PETANAHAN	3	720	PADI	Penerapan bibit muda, penggunaan pupuk organik, penggunaan bibit unggul varietas baru, pengendalian hama terpadu

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	30 PONCOWARNO	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul, perlakuan benih dan tanam bibit kurang dari 21 har, penggunaan pupuk organik, Tanam sistim jajar legowo 4-1, pembuatan POC, pemasangan AWD
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	31 PURING	3	720	PADI	Penggunaan Varietas Unggul, Sistem Tanam Jajar Legowo
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	32 MIRIT	3	720	PADI	Penggunaan Bibit Unggul, Penerapan sistem tanam Jajar Legowo, Penggunaan pupuk organik, Penerapan AWD Pengendalian OPT
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	33 ROWOKELE	3	720	PADI	Perlakuan benih dan penerapan bibit muda; penggunaan pupuk organik; penggunaan bibit unggul; penerapan sistem tanam jajar legowo; pengaplikasian AWD; penggunaan PUTS untuk menentukan pupuk NPK
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	34 AYAH	3	720	PADI	Perlakuan benih dan penerapan bibit muda, penggunaan pupuk organik padat dan cair, penggunaan bibit unggul/varietas unggul baru (VUB), penerapan sistem tanam jajar legowo, penerapan pengairan basah kering, penanggulangan hama terpadu (HPT)
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	35 BUAYAN	3	720	PADI	penggunaan varietas unggul,perlakuan bibit dan tanam bibit muda.penggunaan pupuk organik.pengendalian opt dengan pestisida nabati.tanam jajar legowo.pemasangan AWD
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	36 SRUWENG	3	720	PADI	Penggunaan Varietas Unggul Rendah Emisi, Tanam bibit muda, Penerapan sistem Jajar Legowo, Pemasangan AWD, Pembuatan dan aplikasi pupuk organik padat dan cair, Pembuatan MOL dan pesnab.
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	37 PEJAGOAN	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul baru (VUB), perlakuan tanam dengan bibit muda, Metode Tanam Jajar Legowo, Pengaplikasian teknologi pengairan basah kering (AWD). Pengendalian Hama Terpadu . Penggunaan Pupuk organik Padat dan Cair
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	38 ADIMULYO	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul baru (VUB), perlakuan tanam dengan bibit muda, Metode Tanam Jajar Legowo, Pengaplikasian teknologi pengairan basah kering (AWD). Pengendalian Hama Terpadu . Penggunaan Pupuk organik Padat dan Cair
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	39 KUWARASAN	3	720	PADI	Penggunaan Varietas Unggul, Penggunaan Pupuk Organik Padat dan Cair, pengendalian OPT terpadu
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	40 SEMPOR	3	720	PADI	Penggunaan varietas unggul, tanam bibit muda dan sistem tanam jajar legowo, Pengairan berselang dengan dengan teknologi AWD, Pembuatan pupuk organik serta MOL, Pengendalian OPT ramah lingkungan

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	41 GOMBONG	3	720	PADI	Penggunaan Varietas Unggul (HVC), Jajar Legowo, Pengaplikasian pupuk organik cair, pengendalian hama secara terpadu
	JAWA TENGAH	KEBUMEN	42 KARANG ANYAR	3	720	PADI	Perlakuan benih dan penerapan bibit muda, penggunaan pupuk organik padat dan cair, penggunaan bibit unggul/varietas unggul baru (VUB), penerapan sistem tanam jajar legowo, penerapan pengairan basah kering, penanggulangan hama terpadu (HPT)
	<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>117</b>	<b>28,080</b>		
5	JAWA TIMUR	JEMBER	1 BP3K/UPTD PERTANIAN WILAYAH 5 AJUNG	3	720	PADI	GRK; Praktek PUTS; Pembuatan pesnat; Pembuatan berbagai MOL; Mengukur kesuburan tanah; Pembuatan pupuk org cair dan padat; Pembuatan ZPT dg berbagai bahan; Pembinaan dan memfasilitasi KWT dan Petani Milinial; Pembinaan KEP; Dll sesuai kebutuhan yg mengacu pada dasar CSA
	JAWA TIMUR	JEMBER	2 BP3K/UPTD PERTANIAN WILAYAH 9 BALUNG	3	720	PADI	GRK; Praktek PUTS; Pembuatan pesnat; Pembuatan berbagai MOL; Mengukur kesuburan tanah; Pembuatan pupuk org cair dan padat; Pembuatan ZPT dg berbagai bahan; Pembinaan dan memfasilitasi KWT dan Petani Milinial; Pembinaan KEP; Dll sesuai kebutuhan yg mengacu pada dasar CSA
	JAWA TIMUR	JEMBER	3 BP3K/UPTD PERTANIAN WILAYAH 8 GUMUKMAS	3	720	PADI	GRK; Praktek PUTS; Pembuatan pesnat; Pembuatan berbagai MOL; Mengukur kesuburan tanah; Pembuatan pupuk org cair dan padat; Pembuatan ZPT dg berbagai bahan; Pembinaan dan memfasilitasi KWT dan Petani Milinial; Pembinaan KEP; Dll sesuai kebutuhan yg mengacu pada dasar CSA
	JAWA TIMUR	JEMBER	4 BP3K/UPTD PERTANIAN WILAYAH 10 AMBULU	3	720	PADI	GRK; Praktek PUTS; Pembuatan pesnat; Pembuatan berbagai MOL; Mengukur kesuburan tanah; Pembuatan pupuk org cair dan padat; Pembuatan ZPT dg berbagai bahan; Pembinaan dan memfasilitasi KWT dan Petani Milinial; Pembinaan KEP; Dll sesuai kebutuhan yg mengacu pada dasar CSA
	<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2,880</b>		
6	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	1 UPTD HPT DAN KESWAN PRAYA	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	2 UPTD HPT DAN KESWAN PRAYA TIMUR	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum
	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	3 UPTD HPT DAN KESWAN PRAYA BARAT	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum
	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	4 UPTD HPT DAN KESWAN KEC. PRAYA BARAT DAYA	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum
	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	5 UPTD HPT DAN KESWAN KECAMATAN JONGGAT	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum
	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	6 UPTD HPT DAN KESWAN PRAYA TENGAH	3	720	PADI	penggunaan bibit unggul rendah emisi (inpari 32); seleksi benih; persemaian dgn sistem dapog dgn menggunakan daun pisang/karung semen sbgai alas persemaian (untuk menghindari bibit stres ketika pindah tanam); jajar legowo 2 :1,3:1,4:1; pemupukan berimbang menggunakan pupuk organik dri bonggol pisang dan sabut kelapa, kompos; pengendalian hama terpadu menggunakan pestisida nabati daun maja, daun mimba, serei untuk pengendalian serangga; pengairan dgn menggunakan awd; dum

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>18</b>	<b>4,320</b>		
7	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	1 DANGGA	3	720	PADI	Penanaman sistem tanam jajar legowo, Varietas Unggul Baru (VUB), Penggunaan pupuk berimbang, Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Alat dan mesin pertanian
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>720</b>		
8	KALIMANTAN TENGAH	KANTINGAN	1 BPP PEGETAN	3	720	PADI	Penggunaan benih unggul; Pupuk organik padat; Pupuk organik cair; Pestisida nabati dan MOL; Sistem tanam jajar legowo; Pengolahan lahan dgn mekanisasi handtraktor; Panen dgn mekanisasi combain harvester; Pengaturan air masuk lahan
			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>720</b>		
9	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	1 MANGARA BOMBANG	3	720	PADI	Uji benih; Pembuatan Dan penerapan Pesnab; Pembuatan Dan pemberian pupuk organik; Jajar Legowo; AWD; Penggunaan peralatan GRK
	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	2 POLOMBANGKENG SELATAN	3	720	PADI	Uji benih; Pembuatan Dan penerapan Pesnab; Pembuatan Dan pemberian pupuk organik; Jajar Legowo; AWD; Penggunaan peralatan GRK
	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	3 POLOMBANGKENG UTARA	3	720	PADI	Uji benih; Pembuatan Dan penerapan Pesnab; Pembuatan Dan pemberian pupuk organik; Jajar Legowo; AWD; Penggunaan peralatan GRK
	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	4 PANGKAJENE	3	720	PADI	Uji Benih, Pembuatan Pestisida Nabati, PUTS, Pembuatan Pupuk Organik, KATAM, Tanam metode Jarwo, AWD, POPT
	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	5 MINASA TENE	3	720	PADI	Uji Benih, Pembuatan Pestisida Nabati, PUTS, Pembuatan Pupuk Organik, KATAM, Tanam metode Jarwo, AWD, POPT
	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	6 BUNGORO	3	720	PADI	Uji Benih, Pembuatan Pestisida Nabati, PUTS, Pembuatan Pupuk Organik, KATAM, Tanam metode Jarwo, AWD, POPT

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	7 LABAKKANG	3	720	PADI	Uji Benih, Pembuatan Pestisida Nabati, PUTS, Pembuatan Pupuk Organik, KATAM, Tanam metode Jarwo, AWD, POPT
	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	8 MARANG	3	720	PADI	Uji Benih, Pembuatan Pestisida Nabati, PUTS, Pembuatan Pupuk Organik, KATAM, Tanam metode Jarwo, AWD, POPT

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	NAM BPP	JUMLAH PENYULUH PENDAMPING	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
	SULAWESI SELATAN	BONE	9 KAHU	3	720	PADI	Uji benih; Pembuatan Dan Penggunaan Pesnab; Pembuatan Dan Penggunaan pupuk organik; PUTS; AWD/BWD; Jajar Legowo; Penggunaan alat GRK
	SULAWESI SELATAN	BONE	10 LIBURENG	3	720	PADI	Uji benih; Pembuatan Dan Penggunaan Pesnab; Pembuatan Dan Penggunaan pupuk organik; PUTS; AWD/BWD; Jajar Legowo; Penggunaan alat GRK
	SULAWESI SELATAN	PINRANG	11 WATANG SAWITO	3	720	PADI	Rekomendasi Penggunaan Menggunakan Alat PUTS, Alat Tabela Jaro 2:1 ,Pembuatan/Penggunaan Pupuk Kompos, Pembuatan/Penggunaan Pestisida Nabati, Teknologi Penggunaan AWD/Pengairan Basah Kering
	SULAWESI SELATAN	PINRANG	12 MATTIRO BULU	3	720	PADI	Rekomendasi Penggunaan Menggunakan Alat PUTS, Alat Tabela Jaro 2:1 ,Pembuatan/Penggunaan Pupuk Kompos, Pembuatan/Penggunaan Pestisida Nabati, Teknologi Penggunaan AWD/Pengairan Basah Kering
	SULAWESI SELATAN	PINRANG	13 MATTIRO SOMPE	3	720	PADI	Rekomendasi Penggunaan Menggunakan Alat PUTS, Alat Tabela Jaro 2:1 ,Pembuatan/Penggunaan Pupuk Kompos, Pembuatan/Penggunaan Pestisida Nabati, Teknologi Penggunaan AWD/Pengairan Basah Kering
	SULAWESI SELATAN	PINRANG	14 LANRISANG	3	720	PADI	Rekomendasi Penggunaan Menggunakan Alat PUTS, Alat Tabela Jaro 2:1 ,Pembuatan/Penggunaan Pupuk Kompos, Pembuatan/Penggunaan Pestisida Nabati, Teknologi Penggunaan AWD/Pengairan Basah Kering
	<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>42</b>	<b>10,080</b>		
<b>10</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	KONAWA	1 UEPAI	3	720	PADI	Penggunaan VUB; AWD; Kalender tanam; Jarwo 2 : 1; Pupuk organik p dan c; Pestisida org/nab; PUTS; PHT; Pupuk Berimbang; Bagan Warna Daun
		KONAWA	2 LAMBUYA	3	720	PADI	Penggunaan VUB; AWD; Kalender tanam; Jarwo 2 : 1; Pupuk organik p dan c; Pestisida org/nab; PUTS; PHT; Pupuk Berimbang; Bagan Warna Daun
	<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1,440</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>342</b>	<b>82,080</b>		

**PERSENTASE PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DARI KEGIATAN FASILITASI BOP  
TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
1	ACEH	2,531	556,820	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan Penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Teknik budidaya organic</li> <li>6. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
2	SUMATERA UTARA	2,120	771,680	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penggunaan pupuk hayati</li> <li>5. Pengairan secara efektif dan efisien,</li> <li>6. Panen tepat waktu,</li> <li>7. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
3	SUMATERA BARAT	1,080	270,000	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penggunaan pupuk hayati</li> <li>5. Pengolahan tanah</li> <li>6. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
4	RIAU	716	289,980	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>2. Penggunaan pupuk organik</li> <li>3. Pemupukan berimbang,</li> <li>4. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>5. Pengelolaan OPT terpadu</li> <li>6. Pengairan secara efektif dan efisien</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
5	JAMBI	845	263,640	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2:1</li> <li>2. Pengaturan sistem tanam</li> <li>3. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
6	SUMATERA SELATAN	1,440	604,800	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
7	BENGKULU	808	193,920	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
8	LAMPUNG	1,102	687,648	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	247	96,330	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>7. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
10	KEPULAUAN RIAU	48	92,994	Cabae Merah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu</li> <li>2. Pemupukan berimbang,</li> <li>3. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>4. Pengelolaan OPT Terpadu</li> </ol>
11	DKI JAKARTA	55	3,445	Florikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varietas unggul baru</li> <li>2. Inovasi florikultura</li> <li>3. Urban farming</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
12	JAWA BARAT	2,258	2,276,960	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penerapan biodekomposer</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati</li> <li>6. Pengolahan tanah</li> <li>7. Pengendalian hama wereng batang coklat</li> <li>8. Pengendalian hama tikus</li> <li>9. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
13	JAWA TENGAH	4,141	2,853,114	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penerapan biodekomposer</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang</li> <li>6. Pengolahan tanah</li> <li>7. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
14	DI YOGYAKARTA	386	350,263	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
15	JAWA TIMUR	3,594	3,396,818	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
16	BANTEN	545	355,453	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
17	BALI	484	296,608	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,490	558,750	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian penyakit Blas</li> <li>4. Pemilahan benih menggunakan larutan ZA</li> <li>5. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun</li> <li>6. Penggunaan PUTS mengukur kebutuhan pupuk</li> </ol>
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,890	416,052	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penggunaan pupuk hayati</li> <li>5. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
20	KALIMANTAN BARAT	971	364,125	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
21	KALIMANTAN TENGAH	789	162,690	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
22	KALIMANTAN SELATAN	1,066	277,160	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> </ol>
23	KALIMANTAN TIMUR	605	139,150	Padi Sawah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu</li> <li>2. Pemupukan berimbang,</li> <li>3. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> </ol>
24	KALIMANTAN UTARA	163	29,340	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penerapan biodekomposer</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati</li> </ol>
25	SULAWESI UTARA	738	169,740	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
26	SULAWESI TENGAH	1,185	296,250	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penerapan biodekomposer</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang</li> <li>6. Pengolahan tanah</li> <li>7. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
27	SULAWESI SELATAN	2,224	1,051,752	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benih unggul dan bermutu,</li> <li>2. Penggunaan pupuk organik,</li> <li>3. Pemupukan berimbang,</li> <li>4. Pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel),</li> <li>5. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>6. Pengelolaan OPT terpadu,</li> <li>7. Penggunaan bibit muda,</li> <li>8. Panen tepat waktu,</li> </ol>
28	SULAWESI TENGGARA	993	228,390	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo</li> <li>2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>4. Penerapan biodekomposer</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang</li> <li>6. Pengolahan tanah dan pangairan yang baik</li> <li>7. Penggunaan alat dan mesin pertanian</li> </ol>
29	GORONTALO	459	160,650	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> </ol>
30	SULAWESI BARAT	506	181,160	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super</li> <li>2. Varietas Unggul Baru (VUB)</li> <li>3. Biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Alat dan mesin pertanian</li> </ol>
31	MALUKU	559	40,248	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu</li> <li>2. Pemupukan berimbang,</li> <li>3. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>6. Mekanisasi pertanian</li> </ol>

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JUMLAH PETANI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
32	MALUKU UTARA	481	37,518	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman sistem jarwo super</li> <li>2. Penggunaan benih unggul dan bermutu</li> <li>3. Penerapan biodekomposer</li> <li>4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu</li> <li>5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</li> <li>6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>7. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
33	PAPUA BARAT	421	17,682	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu spesifik lokal</li> <li>2. Pemupukan berimbang,</li> <li>3. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> </ol>
34	PAPUA	870	55,680	Padi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan tanah sempurna,</li> <li>2. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)</li> <li>3. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang</li> <li>4. Varietas Unggul Baru (VUB) spesifik lokal</li> <li>5. Mekanisasi pertanian</li> </ol>
<b>TOTAL</b>		<b>37,810</b>	<b>17,014,500</b>		

**CAPAIAN KINERJA TERKAIT IKSK**  
**Tahun anggaran 2022**

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya 2022  
 Sampai dengan Bulan Desember 2022

NO	SATKER	∑ Total SDM yang mengikuti pelatihan	∑ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	persentase
1	PPMKP CIAWI	1592	1591	99.94%
2	BBPKH CINAGARA	770	652	84.68%
3	BBPP LEMBANG	549	510	92.90%
4	BBPP KETINDAN	652	640	98.16%
5	BBPP BATU	775	703	90.71%
6	BBPP BATANGKALUKU	677	544	80.35%
7	BBPP BINUANG	506	461	91.11%
8	BBPP KUPANG	450	372	82.67%
9	BPP JAMBI	419	368	87.83%
10	BPP LAMPUNG	390	321	82.31%
<b>TOTAL</b>		<b>6,780</b>	<b>6,162</b>	<b>90.88%</b>

Formula/Cara menghitung Capaian IKSK

**Nilai ((∑ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan)  
 / (∑ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) X 100%)**

$$= (6.780/6.162) \times 100\% = 90.88 \%$$

Jadi Capaian IKSK Pusat Pelatihan Pertanian sampai bulan Desember 2022 adalah **90.88%**

## **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**

### **A. Tujuan**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga tujuan tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan 8 (delapan) area perubahan, sehingga menghasilkan aparatur pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tidak terlepas dari sasaran Reformasi Birokrasi yang telah disebutkan sebelumnya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini juga diharapkan dapat menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara konsisten berdasarkan indikator proses dan indikator hasil. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan PPSDMP dilakukan mulai dari pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis dan dijadikan salah satu Indikator Perjanjian Kinerja Pimpinan UPT dengan maksud agar:

1. Setiap pegawai memahami dan mengimplementasikan arti pentingnya reformasi birokrasi;
2. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dari pusat sampai dengan UPT agar dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh sehingga tercipta *good government*;
3. Unit Kerja Pusat terinformasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan UPT;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala rencana aksi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi UPT.

Kondisi yang ingin dicapai pada pelaksanaan reformasi birokrasi :

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan dampak positif untuk seluruh pegawai Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada 8 (delapan) area perubahan. Adapun kondisi yang diharapkan pada masing-masing area sebagai berikut:

**AREA**  
**MANAJEMEN PERUBAHAN**

**HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
2. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;
3. Meningkatnya integritas aparatur;
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur;
5. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

**AREA**  
**PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

**AREA**  
**PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**

**HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
2. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan kesinergisan kelembagaan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural;
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;
7. Meningkatnya kinerja aparatur.

## AREA

### PENATAAN TATA LAKSANA

#### HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov;
2. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
4. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan.

## AREA

### PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

#### HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
2. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
3. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
4. Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok sukses) untuk pengembangan karir pegawai di lingkungannya;
5. Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
6. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur

## AREA

### PENGUATAN AKUNTABILITAS

#### HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegritas;

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional;</li> <li>3. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional;</li> <li>4. Meningkatnya akuntabilitas aparatur.</li> </ol>
<p><b>AREA</b></p> <p><b>PENGUATAN PENGAWASAN</b></p>
<p><b>HASIL YANG DIHARAPKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);</li> <li>2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;</li> <li>3. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;</li> <li>4. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;</li> <li>5. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;</li> <li>6. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh WTP-BPK.</li> </ol>

<p><b>AREA</b></p> <p><b>PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b></p>
<p><b>HASIL YANG DIHARAPKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</li> <li>3. Meningkatnya profesionalisme aparatur.</li> </ol>

## B. PELAKSANAAN PMPRB

- 1) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Tim Assesor BPPSDMP pada tanggal tujuh, bulan April, Tahun 2022 dengan hasil:
- 2) Hasil pengisian lembar kerja evaluasi yang telah disepakati oleh Tim Assesor RB lingkup BPPSDMP kemudian divalidasi oleh Tim Assesor Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 11 s.d. 14 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sandingan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP Pada Sub Komponen Pemenuhan oleh tim Asesor BPPSDMP dengan tim Asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021-2022

No	Sub Komponen	Bobot	Penilaian Itjen LKE Baru	
			Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95	97,5
4	Penataan Tatalaksana	1,00	1,00	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	100
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40	96
<b>Jumlah</b>		<b>14,60</b>	<b>14,45</b>	<b>98,97</b>

- b. Sandingan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP Pada Sub Komponen Reform oleh tim Asesor BPPSDMP dengan tim Asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021-2022

No	Sub Komponen	Bobot	Penilaian Itjen LKE Baru	
			Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,42	81
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100

3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50	75
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,63	97
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	100
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100
<b>Jumlah</b>		<b>21,70</b>	<b>20,50</b>	<b>94,47</b>

Hasil pengisian lembar kerja evaluasi ini ditandatangani oleh Tim Assesor RB BPPSDMP dan Tim Assesor RB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Nilai PMPRB Badan PPSDMP merupakan hasil penjumlahan nilai pada komponen pemenuhan (14,45) dan komponen reform (20,50) adalah 34,95.

c. Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada komponen pengungkit, sub komponen pemenuhan (8 area perubahan) mencapai total skor 14,45 dari bobot 14,60 atau (99%) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95	98,00
4	Penataan Tatalaksana	1,00	1,00	100,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	100,00
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100,00
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	100,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40	96,00
<b>Jumlah</b>		<b>14,60</b>	<b>14,45</b>	<b>99</b>

Tidak tercapainya target disebabkan terdapat kelemahan pada sub komponen sebagai berikut:

- a) Dalam rangka Penataan dan Penguatan Organisasi, telah dilaksanakan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, namun laporan evaluasi belum dibuat kelompok kerja

- b) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, belum dibuat Standar Operasional Prosedur tentang sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan bidang pelatihan dan pendidikan. Namun pada UPT PPMKP Ciawi telah terdapat kompensasi, dan merupakan sebagian kecil jenis layanan pelatihan. Penilaian kepuasan pelanggan masyarakat terhadap pelayanan, Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan baru dilakukan 3 kali dalam setahun pada tahun 2022, sedangkan tahun 2021 hanya 2 kali dalam setahun atau persemester. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada komponen pengungkit, sub komponen reform (08 area perubahan) mencapai total skor 20,50 dari bobot 21,70 atau (94%) dengan rincian sebagai berikut;

No.	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	1,84	61,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100,00
4	Penataan Tataaksana	3,75	3,75	100,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,00	75,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,63	97,00
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	100,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100,00
Jumlah		21,70	20,42	94

Tidak tercapainya target disebabkan terdapat kelemahan pada sub komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen Perubahan yaitu rendahnya perubahan yang dibuat agen Perubahan/inovasi, dan hasilnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
  - b) Terjadinya peningkatan pelanggaran disiplin pegawai baik ringan maupun sedang.
  - a) Dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, rata-rata capaian sasaran kinerja di bawah 100% yaitu Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97%.
- d. Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian reformasi birokrasi, direkomendasikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian agar meningkatkan

indeks Reformasi Birokrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan menyempurnakan beberapa hal yaitu :

1. Sub Komponen Pemenuhan

- a) Aspek Manajemen Perubahan untuk membuat laporan hasil evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.
- b) Aspek Penataan dan Penguatan Organisasi untuk membuat SOP kompensasi jenis pelayanan pelatihan dan pendidikan lingkup BPPSDMP serta jenis kompensasinya, menambah jumlah survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan dan pendidikan minimal 4 kali selama setahun.

2. Sub Komponen Reform

- a) Aspek Manajemen Perubahan, menginstruksikan agen perubahan untuk meningkatkan aktivitas dalam membuat perubahan/inovasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan pelatihan dan Pendidikan
- b) Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM, melakukan pembinaan kepada pegawai untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan punishment disesuaikan dengan PP No. 94 Tahun 2021.
- c) Aspek Penguatan Akuntabilitas, agar meningkatkan nilai capaian sasaran kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97%

- a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai lingkup BPPSDMP dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dari Pusat sampai UPT yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
- c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan terutama dalam transformasi jabatan struktural;
- d. Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap UPT. (Maju, mandiri dan Modern) tuntutan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri terhadap tenaga SDM Pertanian yang kompeten (petani milenial).

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing UPT sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada UPT;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional;
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing UPT.

Mekanisme penilaian:

1. Metodologi, menggunakan LKE yang dibuat melalui aplikasi serabi
2. Teknik penilaian pengumpulan evidence yang sudah dilaksanakan di UPT
3. Jadwal penilaian Desember

2020 serabi

Permenpan RB 26 Tahun 2020 pada 1 Mei 2020

2021 komponen dan bobot berubah sehingga menggunakan nilai Badan

2022 kena serangan cyber sehingga digunakan LKE manual template dari  
Menpan RB dengan penyesuaian area 2 deregulasi kebijakan dan area 3  
penataan organisasi

# LAPORAN

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI NILAI KINERJA ANGGARAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

**TAHUN 2022**



**Kementerian Pertanian  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya jualah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Tahun Anggaran 2022 telah diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan BPPSDMP, dan Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kinerja BPPSDMP Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2023  
Koordinator Evaluasi dan Pelaporan,

Dr. Septalina Pradini, S.Pi, M.Si  
NIP. 19750916 200312 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Output .....	2
D. Alokasi Anggaran .....	2
E. Target Klasifikasi Rincian Output (KRO) .....	4
F. Realisasi Anggaran .....	6
1. Kegiatan Utama .....	6
2. Jenis Belanja .....	7
3. Kewenangan .....	7
4. Satuan Kerja .....	8
5. Klasifikasi Rincian Output (KRO) .....	11
G. Analisis .....	13
H. Kendala .....	18
I. Rekomendasi .....	19

**LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
NILAI KINERJA ANGGARAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan tanggal 29 November 2006 yang mengharuskan setiap instansi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program. Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan peraturan baru sebagai tindak lanjut penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomo 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selama ini telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan setiap tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ruang lingkup evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mencakup arah dan kebijakan pembangunan SDM Pertanian, yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian; (2) penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian; (3) penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan (4) penyelenggaraan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Kegiatan evaluasi secara berkelanjutan ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (satker) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sesuai dengan Rencana Strategis. Melalui kegiatan ini, kinerja yang mencakup capaian keberhasilan dan permasalahan yang terjadi dapat

diketahui sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penyempurnaan program pada periode berikutnya.

## **B. TUJUAN**

Tujuan yang hendak dicapai dengan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP Tahun Anggaran 2022.

## **C. OUTPUT**

Output yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pemantuan, Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Program/Kegiatan BPPSDMP Tahun Anggaran 2022.

## **D. ALOKASI ANGGARAN**

Untuk pelaksanaan **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** yang terdiri dari kegiatan : 1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, dan 3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta **Program Dukungan Manajemen** yang terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP, dialokasikan anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BPPSDMP tahun 2022 sebesar Rp.1.270.982.321.000,-.

Dari total anggaran teralokasikan untuk kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebesar Rp.397.878.040.000,- kegiatan penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian sebesar Rp.90.526.056.000,- kegiatan penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian sebesar Rp.499.149.842.000,- dan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp.283.428.383.000,-.

Secara rinci alokasi anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian per kegiatan utama, belanja dan jenis kewenangan, dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 di bawah ini.

**Tabel 1. Alokasi Anggaran Kegiatan Utama**

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		AWAL	REVISI MARET	REVISI JUNI
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	58.822.829.000	62.591.805.000	63.171.805.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	298.663.008.000	357.881.794.000	357.301.794.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	396.689.864.000	547.156.275.000	527.156.275.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	292.431.899.000	292.431.899.000	292.431.899.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.046.607.600.000</b>	<b>1.260.061.773.000</b>	<b>1.240.061.773.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI JULI	REVISI AGUSTUS	REVISI SEPTEMBER
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	92.679.658.000	92.679.658.000	93.606.422.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	414.584.759.000	414.584.759.000	414.584.759.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	528.144.984.000	528.144.984.000	528.144.984.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	29.2431.899.000	291.330.739.000	291.330.739.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.841.300.000</b>	<b>1.326.740.140.000</b>	<b>1.327.666.904.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI OKTOBER	REVISI NOVEMBER	REVISI DESEMBER
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	93.606.422.000	94.925.381.000	90.526.056.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	414.584.759.000	414.584.759.000	397.878.040.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	528.144.984.000	528.185.748.000	499.149.842.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	288.454.002.000	288.254.092.000	283.428.383.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.324.790.167.000</b>	<b>1.325.949.980.000</b>	<b>1.270.982.321.000</b>

**Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja**

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		AWAL	REVISI MARET	REVISI JUNI
1	BELANJA PEGAWAI	140.326.324.000	140.326.324.000	140.326.324.000
2	BELANJA BARANG	814.867.431.000	1.025.137.531.000	1.001.053.452.000
3	BELANJA MODAL	91.413.845.000	94.597.918.000	98.681.997.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.046.607.600.000</b>	<b>1.260.061.773.000</b>	<b>1.240.061.773.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI JULI	REVISI AGUSTUS	REVISI SEPTEMBER
1	BELANJA PEGAWAI	140.326.324.000	140.326.324.000	138.646.037.000
2	BELANJA BARANG	1.075.005.181.000	1.074.083.419.000	1.076.422.511.000
3	BELANJA MODAL	112.509.795.000	112.330.397.000	112.598.356.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.841.300.000</b>	<b>1.326.740.140.000</b>	<b>1.327.666.904.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI OKTOBER	REVISI NOVEMBER	REVISI DESEMBER
1	BELANJA PEGAWAI	135.769.300.000	135.769.300.000	135.874.163.000
2	BELANJA BARANG	1.076.422.511.000	1.076.249.024.000	1.032.021.478.000
3	BELANJA MODAL	112.598.356.000	113.931.656.000	103.086.680.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.324.790.167.000</b>	<b>1.325.949.980.000</b>	<b>1.270.982.321.000</b>

**Tabel 3. Alokasi Anggaran Kewenangan**

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		AWAL	REVISI MARET	REVISI JUNI
1	KANTOR PUSAT (KP)	191.662.517.000	235.926.011.000	229.077.005.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	609.861.893.000	733.378.122.000	720.227.128.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	245.083.190.000	290.757.640.000	290.757.640.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.046.607.600.000</b>	<b>1.260.061.773.000</b>	<b>1.240.061.773.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI JULI	REVISI AGUSTUS	REVISI SEPTEMBER
1	KANTOR PUSAT (KP)	317.287.232.000	316.186.072.000	317.991.331.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	719.796.428.000	719.796.428.000	720.680.333.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	290.757.640.000	290.757.640.000	288.995.240.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.841.300.000</b>	<b>1.326.740.140.000</b>	<b>1.327.666.904.000</b>

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		REVISI OKTOBER	REVISI NOVEMBER	REVISI DESEMBER
1	KANTOR PUSAT (KP)	318.145.257.000	318.387.879.000	309.235.519.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	717.649.670.000	718.566.861.000	687.449.909.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	288.995.240.000	288.995.240.000	274.296.893.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.324.790.167.000</b>	<b>1.325.949.980.000</b>	<b>1.270.982.321.000</b>

#### **E. TARGET KLASIFIKASI RINCIAN OUPUT (KRO)**

Untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian terdiri dari 7 (tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan), kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terdiri dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Satker Dekonsentrasi, kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian terdiri dari 9 (sembilan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dilaksanakan di Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah Pertanian), dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya terdiri dari 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan dan UPT Pendidikan).

**Tabel 4. Target Output**

N O	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET FEB	TARGET MAR	TARGET JUN	TARGET JUL	TARGET AGS	TARGET SEP	TARGET OKT	TARGET NOV	TARGET DES
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>										
<b>A.</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN</b>										
1	Koordinasi	Kegiatan	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2	Norma. Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PN)	Lembaga	100	100	100	100	100	100	100	85	85
4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
5	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Sertifikasi Profesi dan SDM (PN)	Orang	1.000	1.031	1.031	1.121	1.121	1.121	1.121	1.111	1.111
7	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	3.900	4.285	4.465	4.779	4.779	4.985	4.985	5.777	5.807
<b>B.</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>										
1	Koordinasi	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	68	68	68	68	68	68	68	68	68
3	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	34	34	34	34	34	34	34	34	34
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	38.922	38.922
5	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	6.918	7.926	7.926	7.926	7.926	7.926	7.976	7.478	7.478
<b>C.</b>	<b>PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN</b>										
1	Koordinasi	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Koordinasi (YESS)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Norma. Standard, Prosedur dan Kinerja	NSPK	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	10.000	17.000	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
5	Bantuan Pendidikan Dasar Menengah	Orang	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320
6	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	2	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	556	556	215	215	215	215	215	215	215
9	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964	7.975	7.975
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>										
<b>A.</b>	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP</b>										
1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	920	920	920	920	920	831	831	1.051	1.051
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## F. REALISASI ANGGARAN

Serapan total anggaran BPPSDMP sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.255.884.425.497,- (98,81%)<sup>1</sup>. Pada awal Desember terdapat perubahan pagu dari Rp.1.325.949.980.000,- menjadi Rp.1.270.982.321.000,- karena ada realokasi blokir AA ke BA BUN serta revisi Kanwil (SMKPP Sembawa, BBPP Lembang dan PPMKP Ciawi). Secara rinci serapan anggaran per Kegiatan Utama, Jenis Belanja, Kewenangan, Satker dan Output dapat dilihat pada tabel 5 – 13 di bawah ini.

### 1. KEGIATAN UTAMA

Ada 4 (empat) kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPPSDMP tahun 2022 yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP.

**Tabel 5. Realisasi Kegiatan Utama**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.526.056.000	88.211.581.469	97,44%	2.314.474.531	2,56%
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	397.878.040.000	392.916.885.272	98,75%	4.961.154.728	1,25%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	499.149.842.000	492.600.414.117	98,69%	6.549.427.883	1,31%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	283.428.383.000	282.155.544.639	99,55%	1.272.838.361	0,45%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Dari Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa realisasi serapan anggaran per kegiatan utama secara total mencapai 98,81%, realisasi tertinggi dicapai oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP sebesar 99,55%, selanjutnya yang realisasinya masih dibawah rata-rata capaian BPPSDMP adalah kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebesar 98,75%, kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian (98,69%) dan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian (97,44%).

<sup>1</sup> Data SMART per 15 Januari 2023, Pukul 23.59 WIB

## 2. JENIS BELANJA

Jenis Belanja yang dilaksanakan ada 3 (tiga) yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

**Tabel 6. Realisasi Belanja**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI	135.874.163.000	135.419.112.941	99,67%	455.050.059	0,33%
2	BELANJA BARANG	1.032.021.478.000	1.017.933.607.056	98,63%	14.087.870.944	1,37%
3	BELANJA MODAL	103.086.680.000	102.531.705.500	99,46%	554.974.500	0,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi serapan anggaran per jenis belanja yang tertinggi adalah Belanja Modal sebesar 99,46%, selanjutnya Belanja Pegawai mencapai 99,67% dan yang terendah adalah realisasi Belanja Barang mencapai 98,63%. Penyerapan tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran gaji dan sisa uang makan, terdapat sisa negosiasi dari kontrak dan proses lelang, ada sisa langganan listrik, telepon, dan lain-lain serta jumlah penyuluh yang berkurang karena dalam perjalanannya ada yang pension, meninggal dunia ataupun beralih jabatan ke struktural.

## 3. KEWENANGAN

Pada Tahun 2022 anggaran terbagi dalam 3 (tiga) jenis kewenangan, Dekonsentrasi (DK) di 34 satker provinsi, Kantor Daerah (KD) di 10 satker UPT Pelatihan dan 11 satker UPT Pendidikan, serta Kantor Pusat (KP) di 1 satker BPPSDMP.

**Tabel 7. Realisasi Kewenangan**

NO	JENIS KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	KANTOR PUSAT	309.235.519.000	303.996.548.727	98,31%	5.238.970.273	1,69%
2	KANTOR DAERAH	687.449.909.000	680.584.530.496	99,00%	6.865.378.504	1,00%
3	DEKONSENTRASI	274.296.893.000	271.303.346.274	98,91%	2.993.546.726	1,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.270.982.321.000</b>	<b>1.255.884.425.497</b>	<b>98,81%</b>	<b>15.097.895.503</b>	<b>1,19%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Jika dilihat pada Tabel 7 realisasi serapan anggaran per kewenangan yang masih dibawah rata-rata capaian BPPSDMP adalah Kantor Pusat (KP) hanya mencapai sebesar 98,31%, sedangkan kewenangan Dekonsentrasi (DK) sudah mencapai 98,91%. Capaian kewenangan yang tertinggi adalah Kantor Daerah (KD) sebesar 99,00%.

#### 4. SATUAN KERJA (SATKER)

Satuan Kerja lingkup BPPSDMP sebanyak 56 Satuan Kerja (Satker), dengan 34 satker dekonsentrasi di provinsi, 10 satker UPT Pelatihan, 8 satker UPT Pendidikan Tinggi, 3 satker UPT Pendidikan Menengah, dan 1 satker di Pusat.

**Tabel 8. Realisasi Satker Kantor Pusat**

NO	ESELON II	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	53.112.491.000	51.068.268.090	96,15%	2.044.222.910	3,85%
2	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	123.581.147.000	121.613.538.998	98,41%	1.967.608.002	1,59%
3	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	58.893.120.000	58.695.642.081	99,66%	197.477.919	0,34%
4	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	73.648.761.000	72.619.099.558	98,60%	1.029.661.442	1,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>309.235.519.000</b>	<b>303.996.548.727</b>	<b>98,31%</b>	<b>5.238.970.273</b>	<b>1,69%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 8 realisasi satker Kantor Pusat sebesar 98,31%, masih dibawah rata-rata capaian BPPSDMP. Eselon II Pusat yang serapan anggarannya masih dibawah rata-rata capaian Satker Pusat adalah Pusat Pelatihan Pertanian sebesar 96,15%. Realisasi tertinggi dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDMP sebesar 99,66%, selanjutnya oleh Pusat Pendidikan Pertanian sebesar 98,60% dan Pusat Penyuluhan Pertanian sebesar 98,41%.

**Tabel 9. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pelatihan)**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	120040   BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	8.812.950.000	8.723.652.380	98,99%	89.297.620	1,01%
2	237200   PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI	28.769.101.000	28.701.415.146	99,76%	67.685.854	0,24%
3	239640   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	8.905.685.000	8.736.345.280	98,10%	169.339.720	1,90%
4	239654   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	13.350.318.000	13.307.097.475	99,68%	43.220.525	0,32%
5	239661   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	16.424.691.000	16.411.116.105	99,92%	13.574.895	0,08%
6	239675   BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	14.512.732.000	14.460.673.340	99,64%	52.058.660	0,36%
7	239701   BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	14.212.536.000	14.140.666.896	99,49%	71.869.104	0,51%
8	394771   BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	10.455.960.000	10.411.571.818	99,58%	44.388.182	0,42%
9	412075   BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	11.927.759.000	11.850.490.315	99,35%	77.268.685	0,65%
10	412081   BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	9.281.153.000	9.275.735.848	99,94%	5.417.152	0,06%
	<b>TOTAL</b>	<b>136.652.885.000</b>	<b>136.018.764.603</b>	<b>99,54%</b>	<b>634.120.397</b>	<b>0,46%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 9 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pelatihan) mencapai 99,54%, masih diatas rata-rata capaian realisasi BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Satker BBPP Kupang sebesar 99,94% dan yang terendah adalah BBPP Binuang mencapai 98,10%.

**Tabel 10. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi)**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	412005   POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	77.517.326.000	76.989.498.797	99,32%	527.827.203	0,68%
2	417402   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	80.268.805.000	79.892.321.717	99,53%	376.483.283	0,47%
3	417405   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	29.222.732.000	28.744.955.929	98,37%	477.776.071	1,63%
4	417407   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	33.103.827.000	32.584.670.163	98,43%	519.156.837	1,57%
5	417409   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	100.951.768.000	98.348.118.800	97,42%	2.603.649.200	2,58%
6	417411   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	49.343.108.000	48.667.525.046	98,63%	675.582.954	1,37%
7	417413   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	79.743.558.000	79.134.698.369	99,24%	608.859.631	0,76%
8	417428   POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	27.929.227.000	27.874.362.000	99,80%	54.865.000	0,20%
	<b>TOTAL</b>	<b>478.080.351.000</b>	<b>472.236.150.821</b>	<b>98,78%</b>	<b>5.844.200.179</b>	<b>1,22%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 10 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi) realisasi anggaran mencapai 98,78%, masih dibawah rata-rata capaian realisasi BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Polbangtan Manokwari sebesar 99,80%, sedangkan yang terendah adalah Polbangtan Malang sebesar 97,42%. Pada tahun 2022 ini Polbangtan Medan mengalokasikan Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pengembangan TEFA (pembangunan *miniplant industry* dan *modern nursery kopi*). Sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi sebesar 99,82% dan telah selesai dilaksanakan, serta telah dilakukan *soft launching* pada tanggal 24 Desember 2022. Polbangtan Medan juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja Pengelola SBSN Terbaik 2022 Sektor Perindustrian, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mewakili Kementerian Pertanian. Penghargaan diberikan pada acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN Tahun 2022 pada tanggal 21 Desember 2022 di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan.

**Tabel 11. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Menengah)**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	237814   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	17.458.429.000	17.308.659.858	99,14%	149.769.142	0,86%
2	237924   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	43.310.470.000	43.145.709.228	99,62%	164.760.772	0,38%
3	412101   SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	11.947.774.000	11.875.245.986	99,39%	72.528.014	0,61%
	<b>TOTAL</b>	<b>72.716.673.000</b>	<b>72.329.615.072</b>	<b>99,47%</b>	<b>387.057.928</b>	<b>0,53%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 11 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Menengah) diatas rata-rata capaian BPPSDMP yaitu sebesar 99,47%, realisasi tertinggi adalah SMK-PP Banjarbaru mencapai 99,62%, selanjutnya SMK-PP Kupang mencapai 99,39% dan yang terendah adalah SMK-PP Sembawa sebesar 99,14%.

**Tabel 12. Realisasi Satker Dekonsentrasi**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	019071   DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	579.922.000	579.527.588	99,93%	394.412	0,07%
2	029175   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	31.290.890.000	30.418.276.928	97,21%	872.613.072	2,79%
3	049062   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	1.721.875.000	1.712.454.752	99,45%	9.420.248	0,55%
4	050040   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	17.257.344.000	17.074.205.310	98,94%	183.138.690	1,06%
5	099436   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3.540.142.000	3.529.173.884	99,69%	10.968.116	0,31%
6	140042   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5.130.722.000	5.013.938.430	97,72%	116.783.570	2,28%
7	169065   DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.489.811.000	3.462.011.428	99,20%	27.799.572	0,80%
8	229030   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3.000.411.000	2.993.523.132	99,77%	6.887.868	0,23%
9	239224   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11.023.692.000	11.013.227.825	99,91%	10.464.175	0,09%
10	280031   DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	3.395.280.000	3.383.640.000	99,66%	11.640.000	0,34%
11	305143   DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.115.580.000	1.108.860.000	99,40%	6.720.000	0,60%
12	339059   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	3.133.776.000	3.121.660.000	99,61%	12.116.000	0,39%
13	345105   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.010.811.000	2.947.136.425	97,89%	63.674.575	2,11%
14	403450   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	4.534.520.000	4.517.830.000	99,63%	16.690.000	0,37%
15	403452   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	6.009.575.000	5.991.575.000	99,70%	18.000.000	0,30%
16	403455   DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	2.657.837.000	2.619.572.838	98,56%	38.264.162	1,44%
17	403457   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.132.461.000	14.058.211.352	99,47%	74.249.648	0,53%
18	403458   DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	4.603.127.000	4.596.358.600	99,85%	6.768.400	0,15%
19	417675   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.216.300.000	1.210.674.255	99,54%	5.625.745	0,46%
20	417996   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9.650.249.000	9.380.231.310	97,20%	270.017.690	2,80%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
21	417998   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	12.211.025.000	12.044.774.480	98,64%	166.250.520	1,36%
22	417999   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	16.112.349.000	16.107.456.667	99,97%	4.892.333	0,03%
23	418000   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	6.735.992.000	6.566.511.600	97,48%	169.480.400	2,52%
24	418009   DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	9.720.412.000	9.618.154.478	98,95%	102.257.522	1,05%
25	418010   DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3.504.426.000	3.475.662.000	99,18%	28.764.000	0,82%
26	418011   DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	34.987.762.000	34.457.494.606	98,48%	530.267.394	1,52%
27	418013   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.073.139.000	5.069.239.000	99,92%	3.900.000	0,08%
28	418014   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	5.832.584.000	5.808.106.567	99,58%	24.477.433	0,42%
29	418018   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	6.995.210.000	6.981.017.597	99,80%	14.192.403	0,20%
30	418019   DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	393.762.000	392.437.689	99,66%	1.324.311	0,34%
31	418020   DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	6.467.980.000	6.465.813.768	99,97%	2.166.232	0,03%
32	418021   DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.153.640.000	24.150.525.364	99,99%	3.114.636	0,01%
33	418022   DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	7.314.396.000	7.136.235.800	97,56%	178.160.200	2,44%
34	418024   DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4.299.891.000	4.297.827.601	99,95%	2.063.399	0,05%
	<b>TOTAL</b>	<b>274.296.893.000</b>	<b>271.303.346.274</b>	<b>98,91%</b>	<b>2.993.546.726</b>	<b>1,09%</b>

Sumber: data diolah dari SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 12 realisasi satker Dekonsentrasi mencapai 98,91%, diatas rata-rata capaian BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian sebesar 99,99% sedangkan yang terendah adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 98,91%.

##### 5. KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)

KRO masing-masing per kegiatan adalah sebanyak 7 (tujuh) output untuk kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, 5 (lima) output untuk kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 9 (sembilan) output untuk kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta 6 (enam) output untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

**Tabel 13. Realisasi KRO**

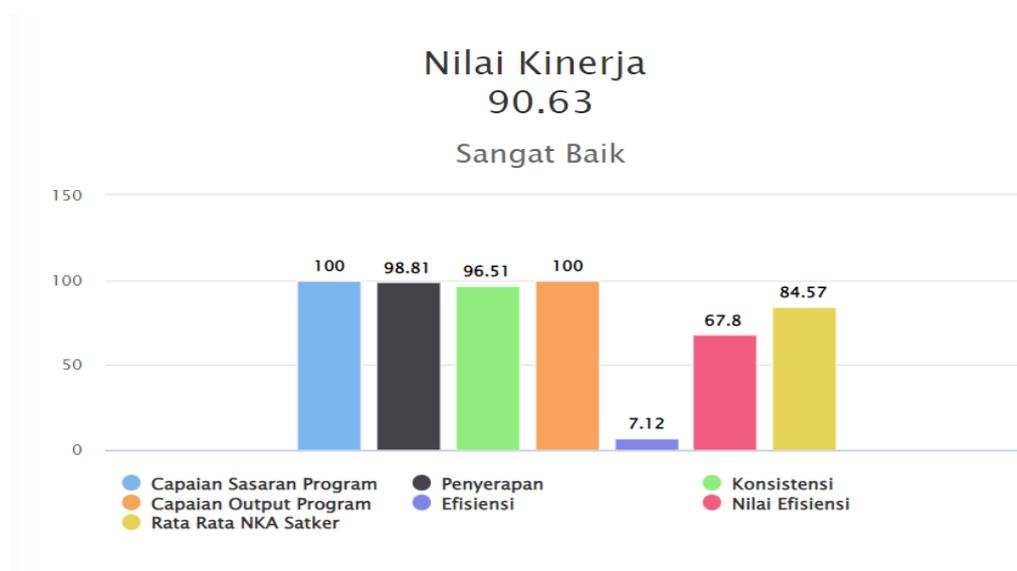
PROGRAM / AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET VOL.	REALISASI VOL.	%	PAGU	REALISASI SP2D	% REALISASI
<b>018.10.DL. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>								
1810. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	62	62	100.00%	7,123,670,000	7,098,698,361	99.65%
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100.00%	8,786,491,000	8,670,592,878	98.68%
	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PN)	Lembaga	85	182	214.12%	2,698,100,000	2,687,891,312	99.62%
	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	2,394	2,373	99.12%	44,326,000,000	42,397,675,212	95.65%
	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	10	10	100.00%	6,352,760,000	6,322,977,235	99.53%
	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM (PN)	Orang	1,111	1,126	101.35%	3,121,060,000	3,054,039,567	97.85%
	SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	5,807	6,025	103.75%	18,117,975,000	17,979,706,904	99.24%
<b>Subtotal</b>						<b>90,526,056,000</b>	<b>88,211,581,469</b>	<b>97.44%</b>
1812. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	6	6	100.00%	10,620,000,000	10,597,801,027	99.79%
	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	68	68	100.00%	8,544,568,000	8,536,642,996	99.91%
	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	34	34	100.00%	15,400,000,000	15,264,106,427	99.12%
	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	38,922	38,676	99.37%	205,831,680,000	203,294,129,299	98.77%
	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	7,478	7,478	100.00%	157,481,792,000	155,224,205,523	98.57%
<b>Subtotal</b>						<b>397,878,040,000</b>	<b>392,916,885,272</b>	<b>98.75%</b>
5892. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	12	12	100.00%	33,195,035,000	32,928,721,260	99.20%
	PEA Koordinasi (YESS) (PN)	Kegiatan	1	1	100.00%	39,450,539,000	38,534,789,660	97.68%
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100.00%	11,391,144,000	11,355,744,268	99.69%
	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	55,710	56,457	101.34%	139,091,661,000	137,738,668,266	99.03%
	BEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Orang	20,320	20,320	100.00%	4,059,627,000	4,040,075,741	99.52%
	CAA Sarana Bidang Pendidikan	Paket	11	12	109.09%	2,051,380,000	1,853,882,845	90.37%
	CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	4	4	100.00%	73,915,406,000	73,857,979,464	99.92%
	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	215	216	100.47%	6,307,006,000	6,294,344,303	99.80%
	SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	7,975	7,978	100.04%	189,688,044,000	185,996,208,310	98.05%
<b>Subtotal</b>						<b>499,149,842,000</b>	<b>492,600,414,117</b>	<b>98.69%</b>
<b>018.10.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
1813. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	9	9	100.00%	23,837,022,000	23,799,554,608	99.84%
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	25	25	100.00%	236,577,334,000	235,424,377,285	99.51%
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	1,051	1,192	113.42%	21,339,902,000	21,294,120,556	99.79%
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	2	3	150.00%	1,674,125,000	1,637,492,190	97.81%
<b>Subtotal</b>						<b>283,428,383,000</b>	<b>282,155,544,639</b>	<b>99.55%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,270,982,321,000</b>	<b>1,255,884,425,497</b>	<b>98.81%</b>

Sumber: data diolah dari aplikasi SMART dan Laporan Satker

Pada Tabel 13 realisasi berdasarkan klasifikasi rincian output rata-rata sudah mencapai target. Namun demikian masih ada beberapa yang belum mencapai target yaitu pada kegiatan Penguatan Penyelenggaraan pelatihan Pertanian, klasifikasi rincian output yang masih rendah adalah Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat pada Program READSI terealisasi 2.373 kelompok masyarakat, target awal 2.394 kelompok masyarakat berdasarkan hasil hitung perencanaan awal program yaitu 342 desa x 7 poktan, namun didalam pelaksanaannya tidak semua desa memiliki jumlah poktannya sebanyak 7 poktan, dikarenakan terbatasnya jumlah petani di desa tersebut, sehingga hanya terbentuk 6 poktan saja di beberapa desa lokasi Program READSI.

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dari target 38.922 orang tercapai 38.675 orang. Hal ini dikarenakan dari sejumlah target tersebut selama pelaksanaan tahun anggaran ada penyuluh memasuki masa pensiun, beralih jabatan ataupun meninggal dunia, dan penyuluh THLTB PP yang diangkat menjadi CPNS dan meninggal dunia.

## G. ANALISIS



**Gambar 1.** Pencapaian Kinerja

Berdasarkan aplikasi SMART Tahun 2022 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2022, total penyerapan anggaran (PA) mencapai 98,81%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (RPD) sebesar 96,51%, efisiensi sebesar 7,12 dengan Nilai Efisiensi sebesar 67,80%, capaian output program sebesar 100%, capaian sasaran program sebesar 100%, dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker sebesar 84,57%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan **Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPSDMP Tahun 2022 sebesar 90,63%**, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, target NKA tahun 2022 sebesar 90,40% sudah tercapai, dan persentase capaian kinerja sebesar **100,25%** kategori **SANGAT BERHASIL**.

NKA diperoleh dari aspek implementasi, aspek manfaat dan Nilai Rata-rata Kinerja Satker, nilai pembobotan seperti pada tabel dibawah.

Perhitungan NK Unit Eselon I				
Indikator			Bobot	
Aspek Implementasi	Capaian Output Program	43,5%	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6%		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%		
	Penyerapan Anggaran	9,7%		
Aspek Manfaat	Capaian Sasaran Program		66,67%	
Nilai Kinerja Satker Rata-rata				50%

Gambar 2. Perhitungan NK Unit Eselon I

Berdasarkan data pada Gambar 1. Pencapaian Kinerja, semua aspek sudah tercapai secara optimal, namun Nilai Efisiensi hanya tercapai 60,53%. Hal ini disebabkan capaian kegiatan fisik sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya hanya sedikit.

Efisiensi terdiri dari **Efisiensi Output Program (OP)** untuk tingkat Unit Eselon I, dan **Efisiensi Efisiensi Rincian Output (RO)** untuk tingkat satuan kerja.

**Rumus Efisiensi Output Program:**

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- $E_{OP}$  : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I
- $AA \text{ Program}_i$  : alokasi anggaran program i
- $RA \text{ Program}_i$  : realisasi anggaran program i
- $COP_i$  : capaian *Output* Program i
- $n$  : jumlah program pada suatu unit eselon I

**Rumus Efisiensi Rincian Output:**

Pengukuran Efisiensi RO dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

- 1) Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia

Rumus Efisiensi:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left( (AAKRO_j \times (\prod_{i=1}^n CRO_{ji})^{\frac{1}{n}}) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- $E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja
- $AAKRO_j$  : alokasi anggaran KRO j
- $RAKRO_j$  : realisasi anggaran KRO j
- $CRO_{ji}$  : capaian RO i pada KRO j
- m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
- n : Jumlah RO pada suatu KRO

2) Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia

Rumus Efisiensi:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- $E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja
- $AARO_i$  : alokasi anggaran RO i
- $RARO_i$  : realisasi anggaran RO i
- $CRO_i$  : capaian RO i

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% - 100%. Dari keempat variabel pengukuran, hanya variabel Efisiensi yang tidak memiliki skala 0% - 100%. Nilai Efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai efisiensi
- E : Efisiensi

Pada aplikasi SMART, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100%, dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

Jadi apabila serapan dicapai maksimal 100% dan Capaian Rincian Output juga maksimal 100%, maka Efisiensi = 0 (nol) karena tidak ada efisiensi disana, dan Nilai Efisiensinya mencapai nilai skala 50%.

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, pengukurannya dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

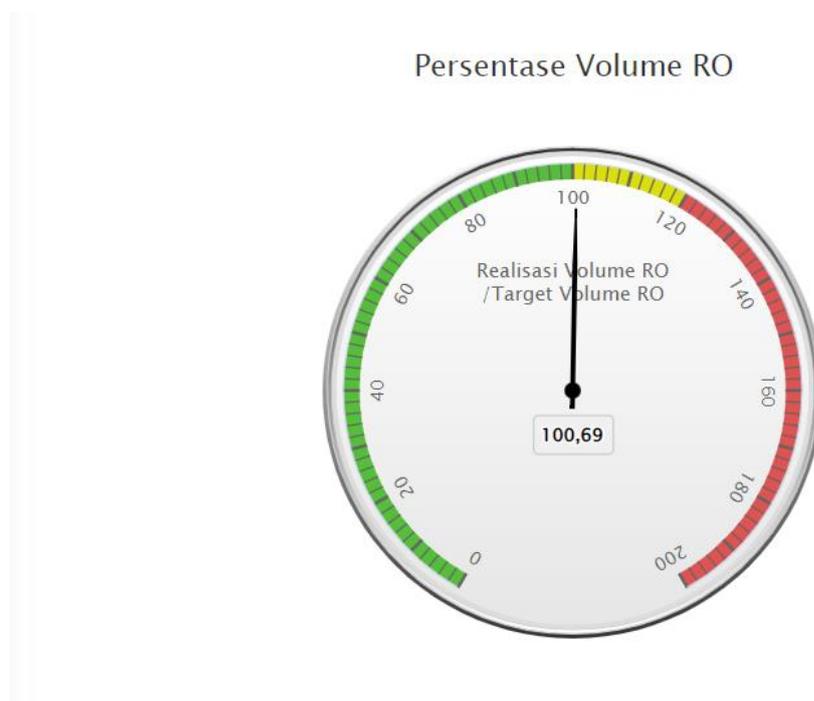
Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK<sub>n</sub> : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK<sub>n</sub> : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan



**Gambar 3.** Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)

Dari data serapan anggaran dan realisasi fisik/RVRO satker lingkup BPPSDMP Tahun 2022 sudah cukup optimal yaitu **terserap anggaran sebesar 98,81% dengan capaian fisik/RVRO 100,69%**, dan capaian RVRO masing-masing per satker juga sudah optimal rata-rata 100%.

Pencapaian Kinerja masing-masing satuan kerja lingkup BPPSDMP dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.

**Tabel 14. Pencapaian Kinerja Satker Lingkup BPPSDMP**

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Konsistensi	Penyerapan Anggaran	Capaian Rancangan Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
1	237200	PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI	98,14	99,76	100,00	4,41	61,02	88,49	BAIK
2	237924	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU, KALSEL	89,54	99,62	100,00	6,48	66,21	88,40	BAIK
3	239640	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL	86,52	98,10	100,00	6,02	65,06	87,37	BAIK
4	417409	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	99,47	97,42	100,00	2,58	56,45	87,20	BAIK
5	417996	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	97,54	97,20	100,00	2,80	57,00	86,98	BAIK
6	412069	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	99,74	98,31	100,00	1,69	54,22	86,70	BAIK
7	417405	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	99,77	98,37	100,00	1,63	54,09	86,67	BAIK
8	417407	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	98,56	98,43	100,00	1,65	54,12	86,46	BAIK
9	418011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	98,83	98,48	100,00	1,52	53,79	86,42	BAIK
10	418000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	94,73	97,48	100,00	2,52	56,29	86,30	BAIK
11	239701	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	99,73	99,49	100,00	0,78	51,95	86,16	BAIK
12	120040	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	97,52	98,99	100,00	1,41	53,51	86,15	BAIK
13	140042	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	94,29	97,72	100,00	2,28	55,69	86,07	BAIK
14	418022	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	93,19	97,56	100,00	2,44	56,09	85,97	BAIK
15	169065	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	98,67	99,20	100,00	0,80	51,99	85,95	BAIK
16	417402	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	99,43	99,53	100,00	0,47	51,17	85,89	BAIK
17	403455	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	95,92	98,56	100,00	1,44	53,60	85,85	BAIK
18	099436	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	99,72	99,69	100,00	0,31	50,77	85,84	BAIK
19	418009	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	96,81	98,95	100,00	1,05	52,63	85,77	BAIK
20	050040	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	96,69	98,94	100,00	1,06	52,65	85,75	BAIK
21	394771	BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	99,97	99,58	99,61	0,35	50,88	85,74	BAIK
22	239661	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN	99,87	99,92	99,89	0,06	50,16	85,67	BAIK
23	417675	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	98,26	99,54	100,00	0,46	51,16	85,67	BAIK
24	418013	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	99,51	99,92	100,00	0,08	50,19	85,66	BAIK
25	280031	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	99,20	99,66	99,95	0,15	50,38	85,61	BAIK
26	418021	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	99,22	99,99	100,00	0,01	50,03	85,57	BAIK
27	417411	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	93,87	98,63	100,00	1,54	53,84	85,55	BAIK
28	412081	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT	98,81	99,94	100,00	0,06	50,15	85,52	BAIK
29	339059	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPIUA BARAT	97,54	99,61	100,00	0,39	50,97	85,49	BAIK
30	403452	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	97,72	99,70	100,00	0,30	50,75	85,47	BAIK
31	239224	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	98,14	99,91	100,00	0,09	50,24	85,42	BAIK
32	412005	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	96,00	99,32	100,00	0,68	51,70	85,39	BAIK
33	239654	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	96,31	99,68	100,00	0,32	50,81	85,23	BAIK
34	418014	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	95,47	99,58	100,00	0,42	51,05	85,14	BAIK
35	418018	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPIUA	94,78	99,80	100,00	0,20	50,51	84,88	BAIK
36	412101	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG, NTT	93,00	99,39	100,00	0,61	51,52	84,80	BAIK
37	417999	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	94,80	99,97	100,00	0,03	50,08	84,77	BAIK
38	417998	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	89,10	98,64	100,00	1,36	53,40	84,56	BAIK
39	418024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	93,49	99,95	100,00	0,05	50,12	84,54	BAIK
40	418019	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	91,54	99,66	100,00	0,34	50,84	84,37	BAIK
41	237814	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	88,35	99,14	100,00	0,86	52,14	84,11	BAIK
42	417413	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	88,10	99,24	100,00	0,76	51,91	84,01	BAIK
43	229030	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	89,90	99,77	100,00	0,23	50,57	84,00	BAIK
44	418020	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	89,99	99,97	100,00	0,03	50,08	83,90	BAIK
45	412075	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	87,17	99,35	100,00	0,67	51,67	83,78	BAIK
46	049062	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	87,37	99,45	100,00	0,55	51,37	83,74	BAIK
47	029175	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	78,06	97,21	100,00	2,79	56,97	83,43	BAIK
48	239675	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU, MALANG JAWA TIMUR	84,51	99,64	100,00	0,36	50,90	83,10	BAIK
49	417428	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	81,10	99,80	100,00	0,27	50,67	82,43	BAIK
50	403450	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	79,26	99,63	100,00	0,37	50,92	82,15	BAIK
51	403458	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	79,53	99,85	100,00	0,15	50,37	82,07	BAIK
52	305143	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	63,91	99,40	100,00	0,60	51,51	79,51	CUKUP
53	019071	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	65,62	99,93	100,00	0,07	50,17	79,48	CUKUP
54	418010	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	60,01	99,18	100,00	0,82	52,05	78,93	CUKUP
55	403457	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	40,81	99,47	100,00	0,53	51,31	75,25	CUKUP
56	345105	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	97,12	97,89	100,00	-20,00	0,00	70,67	CUKUP

Sumber: data diolah dari aplikasi SMART

Dari tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa dari 56 satker lingkup BPPSDMP yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan kategori BAIK sebanyak 51 satker dan kategori CUKUP sebanyak 5 satker. NKA tertinggi diperoleh PPMKP Ciawi sebesar 88,49 (BAIK), sedangkan NKA terendah diperoleh oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 70,67 (CUKUP). Konsistensi dengan nilai tertinggi diperoleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebesar 99,97%, sedangkan Konsistensi rendah <90% sebanyak 18 satker dengan nilai terendah 40,81% di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satker dengan Nilai Efisiensi tertinggi diperoleh SMKPP Banjarbaru sebesar 66,21% dan terendah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (0%). Serapan anggaran tertinggi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,99% dan terendah di Satker Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Tenggara 97,20%. Capaian Rincian Output (CRO) yang tidak optimal atau kurang dari 100% ada 3 satker yaitu Balai Besar pelatihan Pertanian Batangkaluku sebesar 99,89%, Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebesar 99,61% dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebesar 99,95%. Hal ini disebabkan antara lain Sertifikasi profesi dan SDM yang tidak mencapai target di BBPP Batangkaluku dan BPP Jambi. Di BBPP Batangkaluku sebanyak 1 orang tidak hadir karena sakit dan di BPP Jambi 2 orang yang tidak hadir karena hasil tes antigen positif.

## H. KENDALA

Kendala yang ditemui dalam pengumpulan data terkait pencapaian nilai kinerja:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin/petugas monev ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/perencanaan, bahkan sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP), seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH, Perkebunan dan PSP;
- 3) Data capaian output integrasi dari SAS/SAKTI kadang masing anomali sehingga masih diperlukan koreksi terhadap data tersebut;
- 4) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 18 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan

- belum mengacunya pelaksanaan kegiatan terhadap RPD dan terlambat melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman lembar III DIPA;
- 5) Nilai Efisiensi seluruh satker lingkup BPPSDMP masih dibawah 80% karena rata-rata capaian Rincian Output (CRO) sudah tercapai sesuai dengan anggaran yang dialokasikan sehingga hanya sedikit saja efisiensi biayanya.

## I. REKOMENDASI

Dari permasalahan diatas, dalam rangka perbaikan nilai kinerja pada tahun yang akan datang maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan PPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya (tahun 2022 hanya terselenggara 1 kali karena pemotongan anggaran, sehingga semester II hanya dilaksanakan secara *online*), namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu dilakukan koreksi data pada aplikasi SMART pada menu yang telah tersedia setelah integrasi data masuk ke dalam SMART setiap bulannya;
- 4) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD (Rencana Penarikan Dana), agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 5) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO), oleh karena itu perlu dimaksimalkan capaian RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 6) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek CRO dan konsistensi.